

POLITIK KEKERABATAN DALAM POLITIK LOKAL DI SULAWESI SELATAN PADA ERA REFORMASI (STUDI TENTANG REKRUTMEN POLITIK PADA PARTAI GOLKAR, PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI DEMOKRAT SULAWESI SELATAN TAHUN 2009)

Titin Purwaningsih

1. Latar Belakang Masalah

Munculnya fenomena politik kekerabatan diwarnai dengan majunya istri, anak ataupun kerabat dari petahana (*incumbent*) baik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Dalam perspektif teori elite, majunya kerabat petahana menyebabkan sirkulasi elite hanya terjadi di kalangan keluarga penguasa dan menutup peluang bagi calon-calon alternatif di luar elite penguasa. Politik kekerabatan ini cukup problematik karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warganegara. Bahkan politik kekerabatan dianggap membajak demokrasi¹. Untuk mencegah politik kekerabatan, dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, pemerintah mengusulkan untuk melarang keluarga kepala daerah (petahana) untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Calon gubernur tidak boleh mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan

¹ Seperti dikemukakan oleh Siti Zuhro, dalam harian *Kompas*, 22 Februari 2013

gubernur, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan². Demikian juga untuk calon Bupati/Walikota.

Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan). Dari pengertian tersebut, tidak semua fenomena anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan merupakan politik kekerabatan. Meskipun berasal dari keluarga politisi ataupun keluarga yang sudah mempunyai jabatan politik sebelumnya, apabila direkrut melalui mekanisme demokratis dan memenuhi kualifikasi dalam rekrutmen politik, sebenarnya bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan. Oleh karena itu, RUU tersebut akan rawan digugat di Mahkamah Konstitusi karena memilih dan dipilih adalah hak setiap warganegara yang dijamin dalam UUD 1945.

Terdapat beberapa catatan mengenai fenomena politik kekerabatan yaitu, *pertama*; terdapat keinginan yang cukup kuat dari petahana untuk mempertahankan kekuasaan dengan membentuk keluarga politik di tingkat lokal, baik di Jawa maupun luar Jawa. Hal ini menarik untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian ini, mengapa fenomena politik kekerabatan justru semakin berkembang pada era reformasi, terutama dari keluarga petahana. *Kedua*; kecenderungan pembentukan politik kekerabatan ternyata didukung oleh partai-partai besar di lembaga perwakilan yang berarti juga memperoleh dukungan dari elite politik. Dukungan partai-partai besar

² *Harian Kompas*, 16 November 2012.

pada kandidat dari keluarga petahana –yang bahkan bukan berasal dari kader partai—menunjukkan masih lemahnya partai politik sebagai instrumen demokrasi, yang lebih mengandalkan kepada aspek popularitas kandidat. *Ketiga*; dari hasil penelitian awal disertasi ini, fenomena politik kekerabatan yang paling kuat terjadi di provinsi Banten dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecenderungan politik kekerabatan yang berkembang di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari fungsi partai politik, karena bagaimanapun juga, mekanisme rekrutmen politik dilakukan oleh partai. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa anggota keluarga politik sekaligus merupakan pengurus partai politik sehingga memperkuat politik kekerabatan.

2. Pokok Permasalahan

Fokus penelitian ini adalah rekrutmen politik dalam Pemilu 2009 oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat³. Ada empat alasan mengapa mengambil kasus Sulawesi Selatan yaitu *pertama*; dilihat dari aspek historis, wilayah Sulawesi Selatan merupakan bekas wilayah kerajaan Gowa-Tallo, Bone, Wajo dan Soppeng dan budaya Sulawesi Selatan berdasar hubungan patron-klien yang masih berkembang sampai saat ini. *Kedua*; politik di Sulawesi Selatan

³ Alasan pemilihan ketiga partai tersebut karena seperti tercantum dalam tabel 1., fenomena politik kekerabatan di Sulawesi Selatan diusung oleh ketiga partai tersebut. Selain itu, obyek penelitian dalam disertasi ini adalah kandidat dari politik kekerabatan yang memperoleh kekuasaan pertama kalinya dalam pemilu 2009, dan dari penelitian awal terdapat 6 politisi dari politik kekerabatan yang berasal dari ketiga partai tersebut.

diwarnai oleh kompetisi etnis, terutama antara etnis Bugis dan Makassar. *Ketiga*; di Sulawesi Selatan terdapat fenomena politik kekerabatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari beberapa keluarga (Tabel 1.). *Keempat*; identifikasi partai politik dalam satu keluarga di Sulawesi Selatan berbeda-beda.

Dalam kaitannya dengan politik kekerabatan, fungsi partai politik yang paling penting adalah rekrutmen politik, yang merupakan pintu masuk dalam memperoleh jabatan politik. Rekrutmen politik merupakan proses politik yang dilakukan oleh partai politik dalam mendudukan orang-orangnya dalam jabatan politik. Dalam proses pencalonan, partai politik biasanya mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu sesuai dengan garis kebijakan partai, baik mengenai popularitas, elektabilitas, rekam jejak (*track record*), karir politik, sampai dengan loyalitas kepada partai politik.

Tabel 1: Fenomena Politik Kekerabatan di Provinsi Sulawesi Selatan

Keluarga	Nama/Hubungan Kekerabatan	Jabatan	Partai Pengusung	Jabatan dalam Partai
Muhammad Yasin Limpo*	1.Syahrul Yasin Limpo/anak Yasin Limpo	-Gubernur Sulawesi Selatan (2008-1013 dan 2013-2018). -Wakil Gubernur (2003-2008) -Bupati Gowa (1994-2002)	PDK,PAN, PDIP	Ketua DPD Golkar Sulsel (2009-2014)
	2.Sitti Nurhayati/ Istri M Yasin Limpo	-Anggota DPRD Sul-Sel (1987-1992, 1992-1997, 1997-1999) -Anggota DPR RI (2004-2009)	Partai Golkar	
	3. Tenri Olle/anak Yasin Limpo/Kakak Gubernur	-Anggota DPRD Gowa (2004-2009) -Anggota DPRD Sulsel (2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Gowa
	4. Ichsan Yasin Limpo/Anak M Yasin Limpo/adik Gubernur	-Anggota DPRD Sulsel (1999-2004) -Bupati Gowa (2005-2010 dan 2010-2015)	Partai Golkar	Bendahara Partai Golkar Sulawesi Selatan (2009-2015)
	5. Haris Yasin Limpo/Anak M Yasin Limpo/adik Gubernur	Anggota DPRD Kota Makassar (2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kota Makassar
	6. Dewi Yasin Limpo/anak M. Yasin Limpo	Mantan caleg DPR RI 2009	Partai Hanura	Ketua DPD Hanura Sulsel
	7. Indira Thita Chundra/anak Syahrul Yasin Limpo	Anggota DPR RI (2009-2014)	PAN	Wakil Sekjen PAN 2010-2015
	8. Adnan Purichta/anak Ichsan Yasin Limpo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014)	Partai Demokrat	
Qahhar Muzzakar**	1.Aziz Qahhar Muzzakar/anak Qahhar Muzzakar	Anggota DPD RI (2004-2009 dan 2009-1014)		
	2.Buhari Qahar Muzzakar/adik Aziz Muzzakar	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2004-2009 dan 2009-2014)	PAN	Sekretaris PAN Sulsel
	3.Andi Muzzakar/adik Aziz Muzzakar	Bupati Luwu (2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Luwu
Arief Sirajudin***	1.Ilham Arief Sirajuddin/anak Arief Sirajuddin	-Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999-2004) -Walikota Makassar (2004-2009 dan 2009-2014)	Partai Demokrat	Ketua DPD Partai Demorot Sulawesi Selatan
	2.Andi Rahmatika Dewi/Keponakan Ilham Arief	Anggota DPRD Kota Makassar (2009-2014)	Partai Golkar	Wakil Sekretaris Golkar Kota Makassar
Andi Idris Galigo	1.Andi Idris Galigo	Bupati Bone (2003-2008 dan 2008-2013)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Bone, keluar dari Golkar karena konflik pilkada 2012

	2. Muh. Irsan Idris Galigo/anak Idris Galigo	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2009-2014)	Partai Golkar	Ketua Soksi Kab. Bone, menjadi caleg Nasdem 2014
Amin Syam	1. Amin Syam	Gubernur Sulawesi Selatan (2003 – 2008)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Sulsel
	2. Imran Tenri Tatta/anak Amin Syam	Anggota DPRD Makassar (2009 – 2014)	Partai Golkar	Wakil Sekretaris Partai Golkar Kota Makassar
Ibrahim Rewa	1. Ibrahim Rewa	Ketua DPRD Takalar (1999-2002) Bupati Takalar (2002–2007 dan 2007-2012)	Partai Golkar	Mantan Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
	2. Natsir Ibrahim/anak Ibrahim Rewa	Anggota DPRD Takalar (2009 -2012) Wakil Bupati Takalar (2012-2017)	Partai Golkar	Ketua DPD Golkar Kabupaten Takalar
Padjalangi	1. Andi Yaqkin Padjalangi	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (2004 – 2009 dan 2009 – 2104)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD I Golkar Sulawesi Selatan
	2. Andi Fashar Padjalangi / adik Yaqkin Padjalangi	Wakil Bupati Bone (2003-2008) Bupati Bone (2013 -2018)	Partai Golkar	
	3. Andi Rio Idris Padjalangi/ adik Yaqkin Padjalangi	Anggota DPR RI (2009 – 2014)	Partai Golkar	Wakil Bendahara Partai Golkar Sulawesi Selatan
Nurdin Halid	1. Nurdin Halid	Mantan anggota DPR RI	Partai Golkar	
	2. A. Kadir Halid/adik NurdinHalid	Anggota DPRD Sulawesi Selatan (1999 – 2004 dan 2009 – 2013)	Partai Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar Sulawesi Selatan

Sumber: Diolah dari berbagai berita media

* Muhammad Yasin Limpo pernah menjabat sebagai Bupati Gowa, Bupati Maros dan Bupati Takalar

** Qahhar Muzzakar adalah tokoh DI/TII

*** Kol (purn) H.M. Arief Sirajuddin adalah mantan Bupati Gowa

Karena partai politik merupakan pintu masuk terjadinya politik kekerabatan, maka kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan juga dilakukan melalui kajian proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Pada prinsipnya analisis terhadap rekrutmen politik terdiri dari dua variabel yaitu variabel eksternal dan variabel internal. Variabel eksternal meliputi sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian. Sedangkan variabel internal terbagi dua yaitu variabel internal kandidat dan variabel internal partai politik yaitu organisasi partai politik. Karena dalam proses rekrutmen melibatkan interaksi antara kandidat dengan partai, maka disertasi ini lebih memfokuskan pada variabel internal kandidat dari politik kekerabatan dan variabel internal partai politik yaitu organisasi partai. Analisis organisasi partai dalam penelitian ini mengacu kepada pendapat Susan Scarrow⁴ mengenai demokrasi internal partai yang terdiri dari inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi, dan institusionalisasi partai. Analisis terhadap variabel demokrasi internal partai politik ini untuk menjawab berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan dan mengapa partai politik merekrut kandidat yang berasal dari keluarga politik. Meskipun fokus pada variabel internal, disertasi ini tidak menafikan variabel eksternal karena proses rekrutmen politik tidak terjadi dalam ruang hampa namun dipengaruhi oleh faktor eksternal, baik sistem politik, sistem pemilu, sistem

⁴ Kriteria ini mengacu kepada pendapat Susan Scarrow, *Political Parties and Democracy in the Theoretical and Practical Perspectives, Implementing Intra-Party Democracy*, National Democratic Institute for International Affairs, 2005.

kepartaian maupun aspek budaya dan sejarah yang melingkupinya.

Variabel internal kandidat. Variabel internal kandidat dalam rekrutmen politik menitikberatkan pada modal yang dimiliki kandidat dalam memenuhi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan dalam proses rekrutmen. Norris⁵ menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi masuknya anggota kekerabatan ke dalam politik yaitu motivasi dan modal politik. Menurut Prewitt⁶, keluarga politik terjadi karena dua hal yaitu adanya pewarisan ketertarikan politik dari orang tua kepada anaknya dan seorang anak meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Aspek sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi salah satu faktor munculnya politik kekerabatan. Selain itu, kandidat dari keluarga politik biasanya mempunyai modal politik yang memadai yang terdiri dari jaringan politik, pendidikan, pengalaman, dan sumber daya keuangan.

Almond dan Verba⁷ menyatakan bahwa sosialisasi politik dan pengalaman politik bersifat kumulatif mempengaruhi kemampuan politik seseorang. Prewitt⁸ mengkaji secara lebih spesifik teori Almond dan

⁵ Pippa Norris dan Joni Lavenduski, "If Only More candidates Came Forward: Supply-Side Explanation of Candidate Selection in Britain", dalam *British Journal of Political Science*, Cambridge University Press, Vol. 23, No. 3, Juli, 1993.

⁶ Seperti dikutip dalam Donn M. Kurtz II, *Op.Cit.*

⁷ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Sage Publications, 1989, hal. 269-270

⁸ Seperti dikutip Hilde van Liefferinge dan Kristof Steyvers, *Family Matters? Degrees of Family Politicization in Political Recruitment and Career Start of Mayors in Belgium*, dalam *Acta Politica* Vol. 44, No. 2, Palgrave Macmillan, 2009

Verba dalam konteks keluarga politik. Prewitt menyatakan bahwa dalam keluarga politik terjadi sosialisasi politik yang kuat sehingga kandidat dari politik kekerabatan mempunyai aspek personal yang dibutuhkan dalam kriteria seleksi. Prewitt tidak menyebutkan secara spesifik yang dimaksudkan dengan aspek personal dalam kriteria seleksi tersebut, namun Martinez⁹ dalam penelitiannya di Amerika Serikat menyebutkan bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan tingkat aktivisme politik, identifikasi partai, pengetahuan dan ketrampilan politiknya. Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik dalam keluarga menentukan kualitas yang dimiliki kandidat dalam rekrutmen politik. Kualitas kandidat ini merupakan aspek utama dari variabel internal kandidat yang dianalisis dalam disertasi ini. Dalam kasus Indonesia, masalah kualitas kandidat yang berasal dari politik kekerabatan ini masih diperdebatkan, dan sebagian menganggap bahwa kandidat dari politik kekerabatan mengandalkan popularitas keluarga semata.

Oleh karena itu, disertasi ini juga akan mengkaji kualifikasi politisi dalam rekrutmen politik. Dalam menganalisis kualifikasi politisi dari keluarga politik, penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Almond, Norris dan juga Gary Jacobson dan Kernell, yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki kandidat. Gary Jacobson dan Samuel Kernell¹⁰

⁹ Lisa M Martinez, *“Politizing the Family: How grassroots organizations mobilized Latinos for Political Action in Colorado”*, University of Denver Colorado, dalam *Latino Studies*, Vol. 8 No. 4, Macmillan Publisher, 2010.

¹⁰ Gary C. Jacobson dan Samuel Kernell dalam *“Strategy and Choice in Congressional Elections”*, New Haven: Yale University Press, 1983,

menyatakan bahwa kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya. Pengalaman politik dalam penelitian ini akan dilihat dari tiga aspek yaitu aktifitas dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi sosial, dan pengalaman pekerjaan.

Kandidat politisi dari keluarga politik biasanya mempunyai modal politik yang diwariskan (*political legacy*), baik dari nama yang telah dikenal publik, pendidikan, maupun jaringan politik serta kemampuan keuangan dalam kampanye, sehingga memperoleh dukungan rakyat.

Variabel Internal Partai Politik. Analisis terhadap variabel internal partai dilakukan dari 3 aspek yaitu inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai politik. Inklusifitas dan desentralisasi/sentralisasi dalam proses pencalonan dalam disertasi ini terkait dengan bagaimana seleksi kandidat dilakukan dan siapa yang melakukan seleksi. Inklusifitas dilihat dari banyaknya pihak yang terlibat dalam proses rekrutmen politik, apakah hanya ditentukan oleh pimpinan partai, elite partai, ataukah melibatkan masyarakat, anggota ataupun delegasi dalam organisasi partai. Reuven Y. Hazan¹¹ menggambarkan proses seleksi kandidat dalam satu kontinum antara dua ekstrem yaitu

lebih menekankan pada aspek pengalaman politik sebelumnya dalam melihat kualitas kandidat. Lihat dalam L. Sandy Maisel, Walter J. Stone, dan Cherie Maestas, *Reassessing the Definition of Quality Candidates*, makalah disampaikan pada Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 15-17 April 1999.

¹¹ Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, *Democracy Within Parties, Candidate Selection Methods and their Political Consequences*, Oxford University Press, New York, 2010, hal. 9. Pembahasan lebih lanjut tentang inklusifitas ini ada dalam pembahasan mekanisme rekrutmen politik.

inklusif dan eksklusif. Dalam teori demokrasi, semakin inklusif proses seleksinya maka semakin demokratis. Semakin inklusif semakin banyak pihak yang ikut menentukan kandidat (ditentukan pemilih), sementara semakin eksklusif semakin sedikit yang menentukan kandidat (ditentukan ketua partai). Inklusif tidaknya seleksi dalam partai politik juga dipengaruhi oleh kekuatan elite partai. Berdasar hukum besi oligarki dari Michels, maka elite politik cenderung untuk memilih kandidat yang berasal dari jaringannya untuk mempertahankan kekuasaannya.

Desentralisasi/sentralisasi dilihat dari struktur pengambilan keputusan dalam rekrutmen politik, apakah dilakukan oleh pengurus partai pada tingkat pusat, ataukah didesentralisasikan ke daerah. Sedangkan institusionalisasi partai politik dilihat dari tiga aspek yaitu derajat kesisteman yaitu bagaimana aturan dalam rekrutmen politik dilaksanakan, identitas nilai dan citra publik yaitu identitas partai, identifikasinya dengan konstituen dan pengenalan konstituen tentang partai, dan otonomi keputusan yaitu ada tidaknya intervensi dalam pengambilan keputusan partai dalam rekrutmen politik.

Tabel 1. menunjukkan bahwa fenomena politik kekerabatan dalam jabatan politik baik di legislatif/eksekutif maupun kepengurusan partai politik paling banyak terjadi pada partai Golkar daripada partai yang lain. Partai Golkar adalah partai yang sudah cukup kuat dan mapan serta mempunyai pengalaman politik yang panjang. Kuatnya organisasi partai politik bisa dilihat dari keuangan partai, sumber daya manusia dalam

kepengurusan partai dan keanggotaan partai politik¹². Pada masa Orde Baru, Golkar merupakan partai yang hegemonik dengan kader-kader dari birokrasi dan militer yang cukup kuat, namun pada masa reformasi, Golkar kehilangan dua kekuatan pendukung utamanya tersebut. Oleh karena itu, Golkar kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan politik yang terjadi dengan mengembangkan paradigma baru partai Golkar yaitu menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten¹³.

Golkar menyatakan dirinya sebagai partai reformis dan demokratis. Sebagai partai yang demokratis, Golkar bersifat terbuka dan tidak mengandalkan pada kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti dinyatakan Akbar Tanjung:

....Golkar mengembangkan *merit system* agar para anggota dan kader-kadernya tumbuh dan berkembang dari bawah berdasarkan asas prestasi, bukan berdasarkan KKN yang primitif¹⁴.

Fenomena politik kekerabatan pada partai Golkar ini menarik untuk dikaji, mengingat partai Golkar

¹² Peter M. Siavelis dan Scott Morgenstern, *Pathways To Power, Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, The Pennsylvania State University Press, 2008, hal. 12 – 17.

¹³ Akbar Tanjung, *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta, 2007, hal. 98.

¹⁴ *Ibid*, hal. 99.

telah menyatakan dirinya mengembangkan *merit system* dan tidak berdasarkan KKN, namun fenomena politik kekerabatan pada partai Golkar lebih banyak daripada Partai Amanat Nasional maupun Partai Demokrat. Politik kekerabatan merupakan salah satu bentuk patronase politik, dan menurut O'Dwyer, patronage terjadi karena lemahnya institusionalisasi partai politik¹⁵. Analisis politik kekerabatan pada partai politik dalam disertasi ini, dilakukan dengan menguji tesis dari O'Dwyer¹⁶ bahwa politik kekerabatan merupakan pilihan partai pada saat dukungan masyarakat lemah, sehingga partai politik mengandalkan para aktifis ataupun pemimpin populer.

Karena penelitian ini untuk mengkaji variabel internal kandidat politik kekerabatan dan variabel internal partai politik ataupun organisasi partai dalam rekrutmen politik dalam menganalisis politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, maka obyek penelitian dalam disertasi ini meliputi politisi dari keluarga politik yang memperoleh jabatan politik pertama kalinya pada pemilu 2009 dan pengurus partai politik terkait. Berdasar data pada Tabel 1., politisi yang memperoleh jabatan dalam politik pertamakalinya terdiri dari 6 orang yang berasal dari tiga partai politik yaitu 4 orang dari Partai Golkar,

¹⁵ Conor O'Dwyer, *Runaway State Building, Patronage Politics and Democratic Development*, The John Hopkin University Press, Baltimore, 2006, hal. 25.

¹⁶ Thesis O'Dwyer tidak secara spesifik tentang politik kekerabatan, namun tentang patronase politik. O'Dwyer juga menyatakan bahwa patronase politik terjadi karena pembangunan partai tidak didahului dengan pembangunan birokrasi politik sehingga pembangunan partai cenderung kepada pembangunan patronase politik. Lihat Conor O'Dwyer, *Ibid.*

satu orang dari Partai Amanat Nasional dan satu orang dari Partai Demokrat.

3. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan permasalahan di atas, maka pertanyaan penelitian dalam disertasi ini adalah mengapa fenomena politik kekerabatan berkembang dalam politik lokal di Sulawesi Selatan? Pertanyaan tersebut diperinci dalam tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses terbentuknya keluarga politik di Sulawesi Selatan?
 - a. Bagaimana sejarah munculnya keluarga politik tersebut?
 - b. Bagaimana cara mereka memperkuat posisi politik dan jabatannya?
2. Bagaimana kualifikasi kandidat dari keluarga politik dalam rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana demokrasi internal dalam rekrutmen politik dari ketiga partai politik tersebut?
 - a. Bagaimana mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan ketiga partai tersebut?
 - b. Bagaimana institusionalisasi partai politik dalam proses rekrutmen politik pada ketiga partai tersebut?
 - c. Apakah proses pencalonan dilakukan secara demokratis ataukah merupakan manifestasi oligarki partai ?

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini dibagi atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari disertasi ini adalah memperoleh penjelasan teoritis mengenai politik kekerabatan dalam politik lokal di Sulawesi Selatan, terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik untuk merekrut politisi yang berasal dari keluarga politik. Sedangkan tujuan khusus dari disertasi ini adalah:

1. Menganalisis legasi politik dalam membentuk politik kekerabatan di Sulawesi Selatan.
2. Menganalisis kualifikasi kandidat dari keluarga politik dalam rekrutmen politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan.
3. Menganalisis mekanisme rekrutmen politik dalam Pemilu 2009 pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan.
4. Menganalisis politik kekerabatan dan institusionalisasi partai politik pada Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional di Sulawesi Selatan.
5. Menganalisis dan membandingkan demokrasi internal partai (Partai Demokrat, PAN dan Partai Golkar) dalam rekrutmen politik.

Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Aspek teoritis. Terdapat 3 penjelasan teoritis yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu *pertama*; menjelaskan *political legacy* yang membentuk politik kekerabatan. *Kedua*, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik dalam merekrut kandidat

yang berasal dari keluarga politik di Sulawesi Selatan. Apakah politik kekerabatan yang terjadi di Sulawesi Selatan merupakan manifestasi dari oligarki partai seperti dalam tesis Robert Michels; ataukah kandidat dari keluarga politik memenuhi kualifikasi sebagai politisi seperti yang dinyatakan Prewitt dan Martinez; ataukah maraknya politik kekerabatan merupakan strategi partai politik karena lemahnya institusionalisasi partai politik seperti yang dinyatakan oleh O'Dwyer, ataukah merupakan akumulasi dari berbagai faktor tersebut. *Ketiga*, menjelaskan demokrasi internal partai politik dalam proses rekrutmen politik. Dari ketiga penjelasan teoritis tersebut akan memperkaya aspek teoritis dalam ilmu politik, khususnya dalam kajian politik kekerabatan, rekrutmen politik dan demokrasi.

2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan bagi para pengambil kebijakan untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, baik penguatan dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politiknya, terutama masukan bagi Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta penguatan partai politik, khususnya dalam mengambil kebijakan tentang politik kekerabatan di Indonesia. Bagi partai politik, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi penguatan institusionalisasi partai politik, khususnya dalam rekrutmen politik.

5. Review Literatur

Meskipun fenomena politik kekerabatan muncul di berbagai negara, namun kajian tentang politik

kekerabatan masih terbatas. Berbagai penelitian tentang politik kekerabatan bisa dilihat dalam Tabel 2., yang sebagian besar mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan dan kompetisi keluarga politik dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo dkk¹⁷ mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat, Pablo Querubin¹⁸ dan Mendoza et.al¹⁹ mengenai politik kekerabatan di Philipina. Ketiga penelitian tersebut menunjukkan hasil yang sama bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitian Dal Bo menunjukkan bahwa seorang legislator yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik, mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Atau dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk politik kekerabatan. Hal ini disebabkan karena *political capital* yang terkait dengan mesin politik dapat diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, fenomena politik kekerabatan tetap eksis sampai saat ini.

¹⁷ Ernesto Dal Bo, *Op.Cit.*

¹⁸ Pablo Querubin, *Op.Cit.*

¹⁹ Ronald U Mendoza, et. al., *Inequality in democracy: Insights from an empirical analysis of Political dynasties in the 15th Philippine Congress*, dalam <http://mpr.ub.uni-muenchen.de/40104/>, 15 Juli 2012.

Tabel 2.: Penelitian tentang Politik Kekerabatan yang pernah dilakukan

Nama Peneliti	Tema	Hasil Penelitian
Ernesto Dal Bo ²⁰	Keterkaitan politik dinasti dan kompetisi politik	Politik dinasti di Philipina muncul karena adanya keinginan petahana untuk mempertahankan kekuasaan. “ <i>Power begets power</i> ”
Pablo Querobin ²¹	Politik dinasti di Philipina	Pembatasan politik dinasti melalui konstitusi tidak efektif, karena kekuatan sumber daya yang dimiliki politisi dinastik ataupun <i>incumbent</i> .
Hess ²²	Politik dinasti di AS	Politik dinasti lahir karena tradisi keluarga, <i>brand name</i> , dan kemampuan yang diwariskan
Neil de Votta ²³	Politik dinasti di Srilanka	Politik dinasti diciptakan oleh rejim yang otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya
Daniel Markham Smith ²⁴	Politik dinasti di Jepang dan Irlandia	Politik dinasti justru berkembang pada era demokratisasi karena

²⁰ Ernesto Dalbo, Pedro Dal Bo dan Jason Snyder, *Op.Cit*.

²¹ Pablo Querobin, *Op.Cit*.

²² Hess, *America's Political Dynasties*, dalam Donn M. Kutrz II, *Op.Cit*

²³ Neil de Votta, *Srilanka: From Turmoil to Dynasty*, dalam Journal of Democracy, Vol. 22, No. 2, April 2011.

²⁴ Daniel Markham Smith, *Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies*, Disertasi, University of California, 2012.

		keunggulan <i>incumbent</i> , desentralisasi dalam rekrutmen, dan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat.
Kimberly Lynn Casey ²⁵	Politik dinasti di AS	Politik dinasti terjadi dalam pemilu presiden, wakil presiden, anggota kongres maupun pemilihan gubernur. Politik dinasti lebih banyak terjadi di Partai Demokrat.

Hasil penelitian Mendoza menunjukkan bahwa 70 % dari anggota Kongres yang berasal dari keluarga politik memperoleh jumlah suara yang lebih besar dalam pemilu daripada yang tidak berasal dari keluarga politik. Dengan kata lain, ketiga penelitian tersebut menyimpulkan bahwa variabel internal kandidat yaitu sumber daya yang dimiliki politisi dari keluarga politik merupakan faktor yang mempengaruhi maraknya politik kekerabatan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa wilayah-wilayah dengan politik kekerabatan mempunyai karakteristik tertentu yaitu standar hidup yang rendah, pembangunan manusia yang rendah dan kesenjangan yang tinggi.

Selain variabel internal politik kekerabatan, studi yang dilakukan Daniel Markham Smith di Jepang menganalisis variabel eksternal yaitu pengaruh sistem pemilu terhadap dinasti politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (*candidate centered elections*) menguntungkan

²⁵ Kimberly Lynn Casey, *Op.Cit.*

keluarga politik karena kandidat dari keluarga politik lebih dikenal oleh publik.

Berdasarkan penelusuran literatur, terdapat beberapa penelitian tentang fenomena politik kekerabatan maupun peran keluarga dalam politik lokal di Indonesia, seperti dalam Tabel 3.

Penelitian tentang politik kekerabatan dalam disertasi ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya. Dari Tabel 2., meskipun penelitian-penelitian tersebut juga mengkaji maraknya politik kekerabatan di berbagai negara, namun lebih fokus kepada aspek eksternal dalam rekrutmen politik seperti sistem pemilu, sistem politik, dan kekuatan kompetitornya dan aspek internal keluarga politik. Sementara penelitian ini selain memfokuskan pada aspek internal politisi dari keluarga politik, juga fokus pada variabel internal partai politik dalam menganalisis fenomena politik kekerabatan di Sulawesi Selatan.

Tabel 3.: Penelitian tentang Politik Lokal di Indonesia

Nama Peneliti	Tema	Hasil Penelitian
Syarif Hidayat ²⁶	<i>Shadow State</i> , Bisnis dan politik di Banten	Permasalahan politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara <i>state</i> dan <i>society</i> , terutama pada interaksi <i>local state actors</i> (elit pemerintahan) dan <i>societal actors</i> (jawara-pengusaha), dan terjadi <i>shadow state</i> dengan peran Tuan Besar.
Andi Faisal Bakti ²⁷	Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan	Desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis.
Eriyanto ²⁸	Dinasti Politik dalam Pilkada Kediri	Keberhasilan dinasti politik dalam pilkada dipengaruhi oleh faktor <i>incumbent</i> dan aspek pribadi dari calon seperti kepribadian,

²⁶ Syarif Hidayat, Shadow State..? Bisnis dan Politik di Banten, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, Obor, Jakarta, 2007, hal. 267-303.

²⁷ Andi Faisal Bakti, Kekuasaan Keluarga di Wajo, Sulawesi Selatan, dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Ibid*, hal. 491-504.

²⁸ Eriyanto, Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? (Kasus Pilkada Kabupaten Kediri), dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 36 tahun 2012, MIPI, Jakarta, hal. 68-90.

		pengalaman dan kemampuan calon.
Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff ²⁹	Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik	Reformasi politik hanyalah ilusi karena politik lokal di Indonesia memunculkan <i>local strongmen</i> yang menguasai ekonomi politik.
Buehler ³⁰	Pilkada di Gowa	Ikatan partai dengan calon dalam pilkada lebih didasarkan atas kepentingan pendanaan partai sehingga partai cenderung memilih calon yang mempunyai modal yang besar.
Wasisto Raharjo Djati ³¹	Familisme dalam demokrasi lokal	Familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme dan feodalisme, yang ketiganya membentuk tipologi rejim dinasti politik yang berbeda di Indonesia

²⁹ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, tahun 2010, hal. 9-30.

³⁰ Michael Buehler dan Paige Tan, *Op.Cit.*

³¹ Wasisto Raharjo Djati, Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal, dalam *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, LabSosio Universitas Indonesia, Vol. 18. No 2., Juli 2013, hal. 181-231.

Dari berbagai penelitian yang pernah dilakukan, penelitian tentang politik kekerabatan di Indonesia masih merupakan penelitian yang baru. Ada beberapa kekuatan dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian-penelitian yang lain, yaitu: *pertama*; penelitian ini menganalisis politik kekerabatan dari variabel internal partai politik yang belum pernah diteliti sebelumnya, yaitu dari aspek organisasi partai. *Kedua*; penelitian ini juga mengkaji politik kekerabatan dari internal kandidat dari keluarga politik dalam rekrutmen politik di Sulawesi Selatan. Selain menganalisis faktor internal sumber daya ataupun legasi politik yang dimiliki keluarga politik sebagai faktor yang mempengaruhi maraknya politik kekerabatan, faktor internal dalam disertasi ini juga menganalisis aspek kualifikasi mereka dalam rekrutmen politik. *Ketiga*, penelitian ini juga menganalisis politik kekerabatan dari perpektif demokrasi internal partai politik. Dari ketiga aspek tersebut dapat dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik dalam merekrut politisi yang berasal dari politik kekerabatan di Sulawesi Selatan.

6. Perpsektif Teoritik

Teori yang digunakan dalam disertasi ini fokus kepada dua variabel dalam analisis rekrutmen politik, yaitu variabel internal kandidat dari politik kekerabatan dan variabel demokrasi internal partai politik (organisasi partai politik). Variabel kandidat dari politik kekerabatan dijabarkan dalam dua sub variabel yaitu kualitas kandidat dan legasi politik yang dimiliki kandidat dalam proses rekrutmen politik, sedangkan variabel organisasi partai politik dijabarkan dalam dua sub variabel yaitu

mekanisme rekrutmen politik dan institusionalisasi partai politik. Dari kedua variabel tersebut, terdapat 3 teori utama yang dianalisis dalam disertasi ini yaitu teori sosialisasi politik dari Almond dan Verba, teori oligarki dari Robert Michels dan keterkaitan institusionalisasi partai dan patronase politik dari O'Dwyer. Dalam menganalisis ketiga teori tersebut didukung dengan teori-teori lainnya yaitu teori tentang rekrutmen politik dari Norris dan Reuven Hazan, model rekrutmen politik dari Barbara Geddes, teori demokrasi internal partai dari Susan Scarrow, teori institusionalisasi partai politik dari Lars Svavand dan Randall, teori elite dari Suzanne Keller, patronase politik dari Scott, serta teori tentang kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell.

6.1. Rekrutmen Politik

Fungsi inti partai politik adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik merupakan proses politik di mana partai berusaha untuk mendudukkan orang-orangnya dalam jabatan politik. Rekrutmen politik ini dilakukan sebagai sarana representasi dan agregasi kepentingan rakyat, yang dilakukan melalui sosialisasi politik dan komunikasi politik, sehingga pemerintahan yang dibentuk memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat.

Studi tentang rekrutmen politik yang digunakan dalam disertasi ini mengacu kepada model analisis dari Morgenstern dan Siavelis³² dan Norris³³. Menurut

³² Peter M. Siavelis dan Scott Morgenstern, *Op.Cit.*, hal. 12 – 17.

³³ Pippa Norris, *Passages to Power, Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, Cambridge University Press, 1997, hal 1 – 14.

Morgenstern dan Siavelis, analisis terhadap rekrutmen politik terdiri atas dua variabel, yaitu variabel hukum dan variabel partai. Sedangkan Norris membagi analisis rekrutmen politik dalam empat level analisis yaitu 1) analisis pada level sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, sistem pemilu dan sistem kepartaian; 2) proses rekrutmen yang menganalisis demokrasi internal partai; 3) analisis terhadap para kandidat; dan 4) level analisis pada selektor.

Dari kedua pendapat tersebut, penulis membagi analisis terhadap rekrutmen politik dalam dua variabel yaitu variabel eksternal dan variabel internal. Variabel eksternal meliputi sistem hukum, sistem politik dan sistem kepartaian yang mempengaruhi rekrutmen politik namun tidak secara langsung berkaitan dengan proses rekrutmen politik yang dilakukan. Variabel internal adalah variabel yang berkaitan langsung dengan proses dan mekanisme rekrutmen politik oleh partai politik. Dalam relevansinya dengan kajian politik kekerabatan, rekrutmen politik merupakan proses yang melibatkan secara langsung antara partai politik dengan kandidat yang berasal dari keluarga politik. Oleh karena itu, meskipun tidak mengabaikan variabel eksternal, disertai ini lebih memfokuskan pada variabel internal partai politik yaitu organisasi partai (demokrasi internal partai) dan variabel internal kandidat dari keluarga politisi.

Politik kekerabatan sering dianggap bertentangan dengan demokrasi, padahal politik kekerabatan di berbagai negara muncul dalam era demokratisasi yang dilahirkan oleh partai-partai politik. Oleh karena itu, mengkaji politik kekerabatan dari perspektif demokrasi internal partai politik sangat penting dilakukan karena sebagaimana dikemukakan oleh

Prasai³⁴, bahwa demokrasi internal partai merupakan prasyarat bagi perkembangan suatu budaya demokratis dalam masyarakat yang lebih luas.

Variabel internal, mengacu kepada Morgenstern dan Siavelis³⁵ merupakan variabel partai yang terdiri dari inklusifitas, sentralisasi/desentralisasi, organisasi partai dan keuangan partai, namun demikian tidak ada kriteria yang baku dalam menganalisis organisasi partai. Keuangan partai merupakan bagian dari organisasi partai³⁶, sehingga variabel partai meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan organisasi partai. Sementara menurut Susan Scarrow³⁷ dimensi utama dari organisasi partai dalam rekrutmen politik merupakan demokrasi internal partai yang meliputi inklusifitas, desentralisasi/sentralisasi dan institusionalisasi partai. Demokrasi internal partai dapat dipahami sebagai struktur dan proses pengambilan keputusan dalam partai politik yang memungkinkan bagi individu warga negara untuk mempengaruhi berbagai pilihan yang ditawarkan partai kepada pemilihnya³⁸. Inklusifitas terkait dengan bagaimana jangkauan partai dalam pembuatan keputusan. Apakah pembuatan keputusan hanya dilakukan oleh satu

³⁴ Seperti dikutip dalam Fako Johnson Likoti, *Investigating Intra-party Democracy in Lesotho: Focus on Basutoland Congress Party dan Basotho National Party*, EISA Occasional Paper, No. 39, Desember 2005.

³⁵ Morgenstern dan Siavelis, *Op.Cit.*

³⁶ Lihat dalam Paul webb dan Stephen White, *Political Parties in New Democracies*, 2007, Chapter 1.

³⁷ Susan Scarrow, *Op.Cit.*

³⁸ Lihat dalam Blessing Chinsinga dan Gerald Chigona, *The State of Intra-Party Democracy in Malawi: A Comparative Study of Selected Party Constitutions*, Center for Multy party Democracy Malawi, Agustus 2010.

orang pemimpin, sekelompok orang, ataukah dengan melibatkan anggota partai dan masyarakat. Sentralisasi/desentralisasi terkait dengan struktur organisasi partai dalam pembuatan keputusan, apakah tersentralisasi atau desentralisasi. Dalam studi ini, inklusifitas dan desentralisasi/sentralisasi sebenarnya terkait dengan mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik, sehingga variabel demokrasi internal partai politik dalam penelitian ini merupakan variabel organisasi partai yang meliputi meliputi mekanisme rekrutmen politik dan institusionalisasi partai politik.

Proses rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik sangat beragam. Beberapa ahli membedakan jenis-jenis rekrutmen politik. Berdasar mekanisme rekrutmennya, Almond dan Powell³⁹ membedakan proses rekrutmen politik menjadi dua yaitu mekanisme tertutup yang dilakukan secara tertutup kepada orang-orang tertentu seperti kawan, kesamaan agama, daerah, etnis maupun keluarga dan mekanisme terbuka di mana rekrutmen politik dilakukan secara terbuka kepada warna negara yang memenuhi syarat. Sementara Barbara Geddes⁴⁰ membedakan 4 model rekrutmen yaitu *pertama*; *partisanship*; yaitu rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik dengan mempertimbangkan loyalitasnya kepada partai. Model rekrutmen ini kurang memperhatikan kompetensi. *Kedua*; *meritocratic*, yaitu rekrutmen politik dari kalangan yang mempunyai

³⁹ Gabriel Almond dan E Bingham Powell, *Comparative Politics: A Development Approach*, Feffer&Simons Privated, Bombay, 1966, hal. 79.

⁴⁰ Barbara Geddes, *Politicians Dilema: Building State Capacity in Latin America*, University of California Press, 1996, hal. 142-181.

kompetensi yang tinggi seperti pengusaha, teknokrat, guru dan pekerja ahli. *Ketiga; compartmentalization*, yaitu rekrutmen politik yang dilakukan berdasar pertimbangan pragmatis, bisa berdasar meritokrasi maupun pengangkatan lain untuk memperoleh dukungan jangka pendek maupun mengembangkan pengikut yang loyal. *Keempat; survival*, yaitu rekrutmen politik yang didasarkan pada prinsip balas jasa dan sumber daya pelamar dan cenderung bersifat patronase. Keempat jenis rekrutmen politik menurut Barbara Geddes tersebut lebih didasarkan pada karakteristik calon yang akan direkrut oleh partai.

Reuven Hazan⁴¹ menggambarkan lima jenis proses seleksi kandidat antara dua kontinum inklusif di satu sisi dan eksklusif di sisi yang lain. Kelima proses seleksi kandidat tersebut adalah *pertama*; seleksi yang dilakukan oleh pemilih (*voters*), *kedua*; seleksi yang dilakukan oleh anggota partai, *ketiga*; seleksi yang dilakukan oleh delegasi partai, *keempat*; seleksi oleh elite partai, dan *kelima*; seleksi oleh pimpinan partai.

Permasalahan yang seringkali muncul dalam proses rekrutmen dan seleksi kandidat adalah bahwa proses seleksi dianggap sebagai rahasia dapur partai politik, sehingga tidak diinformasikan kepada publik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Duverger⁴² bahwa seleksi kandidat merupakan tindakan rahasia dan bersifat privat, sedangkan Howard dalam analisisnya tentang rekrutmen politik di Inggris menggunakan istilah "*the secret garden*" dalam seleksi kandidat politik di Inggris. Kerahasiaan tersebut membuat publik tidak mengetahui

⁴¹ Reuven Y. Hazan dan Gideon Rahat, *Op.Cit.*, hal. 34

⁴² *Ibid.*, hal. 7

kriteria seleksi yang dilakukan, dan siapa yang menentukan dalam proses seleksi.

Proses seleksi kandidat juga dipengaruhi oleh asal-usul pembentukan partainya. Dilihat dari asal-usul partai politik di Indonesia, maka tidak ada partai politik yang dibentuk dari bawah. Pembentukan partai dilakukan dari atas oleh elite-elite politik, meskipun kemudian disusun perangkat organisasi partai sampai pada tingkat yang terendah. Konsekuensi dari pembentukan partai dari atas oleh elite-elite politik adalah partai menjadi lebih elitis. Meskipun secara formal terdapat mekanisme pembuatan kebijakan/keputusan, namun realisasinya sangat ditentukan oleh elite-elite partai ataupun figur-figur dominan dalam partai politik. Mekanisme ini akan memperlemah partai politik⁴³.

Elitisme dalam pengambilan keputusan di partai politik merupakan fenomena umum dalam organisasi yang birokratis yang dikatakan oleh Robert Michels sebagai oligarki partai⁴⁴. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan sekelompok kecil minoritas⁴⁵. Menurut Michels, hukum besi oligarki melekat dalam setiap organisasi. Organisasilah yang melahirkan dominasi yang terpilih

⁴³ *Ibid.*, hal 9.

⁴⁴ Robert Michels, *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta, 1984. Konsep oligarki partai dari Mitchel ini dikritik oleh Jeffrey Winters dalam bukunya *Oligarcgy*, bahwa Mitchel mengaburkan konsep oligarki dengan elite. Oligarki selalu terkait dengan upaya mempertahankan kekayaan material ataupun mempertahankan pendapatan.

⁴⁵ *The International Encyclopedia of The Social Sciences*, seperti dikutip dalam Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, Cambridge University Press, London, 2011, hal. 1.

terhadap yang memilih, yang diberi mandat dengan pemberi mandat, yang diutus dengan yang mengutus, karena bicara organisasi berarti bicara oligarki. Hukum besi oligarki ini muncul, menurut Michels, karena kapasitas politik massa yang rendah, tidak berpengalaman, tidak terdidik, apatis dan inferior⁴⁶. Michels menyatakan bahwa oligarki merupakan produk yang mutlak dari prinsip berorganisasi⁴⁷.

Organisasi cenderung ke arah oligarki. Dalam setiap organisasi, partai politik, serikat profesi, atau asosiasi sejenis terjelma kecenderungan aristokrasi. Mekanisme organisasi yang memiliki struktur yang kuat, mendorong perubahan dalam massa yang terorganisasi, sehingga posisi dari orang yang memimpin dan yang dipimpin menjadi berubah. Sebagai hasil dari organisasi, setiap partai atau organisasi profesi terbagi menjadi minoritas selaku pemimpin dan mayoritas selaku yang dipimpin.

Oligarki muncul karena perkembangan organisasi. Semakin besar organisasi, semakin terspesialisasi fungsi-fungsi dan struktur dalamnya yang dilakukan melalui mekanisme birokrasi dan semakin membutuhkan pemimpin yang profesional. Kedudukan pemimpin menjadi semakin kuat, sehingga perkembangan oligarki selaras dengan perkembangan

⁴⁶ David Held, *Models of Democracy*, Akbar Tanjung Institute, Jakarta, 2006, hal 156.

⁴⁷ Robert Michels, *Op.Cit.*, hal 68.

organisasi. Semakin berkembang organisasi, semakin kurang demokratis dan semakin oligarkis⁴⁸.

Mekanisme yang bersifat oligarkis ini menunjukkan bahwa sistem dalam partai belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak terlepas dari hubungan antara partai politik dengan konstituen yang bersifat pragmatis. Partai politik hadir ke masyarakat hanya saat pemilu dimana elite-elite partai membutuhkan dukungan untuk memperoleh kekuasaan yang sah. Dengan demikian, konstituen hanyalah sebagai alat legitimasi dan kendaraan politik bagi para elite.

Teori Robert Michels ini digunakan untuk menganalisis mekanisme rekrutmen politik pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan. Analisis terhadap teori oligarki ini didukung dengan teori seleksi kandidat dalam rekrutmen politik dari Reuven Y Hazan dan model rekrutmen politik dari Barbara Geddes.

6.2. Institusionalisasi Partai Politik

Menurut Huntington, institusionalisasi atau pelembagaan adalah proses dimana organisasi dan tata cara memperoleh nilai yang baku dan stabil⁴⁹. Dengan kata lain, institusionalisasi partai politik adalah pematangan partai politik baik dalam wujud perilaku

⁴⁸ Lihat dalam Gordon Hands, Robert Michels and The Study of Political Parties, dalam *British Journal of Political Science*, Vol. 1, No. 2, April 1971, cambridge University Press, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/193505>

⁴⁹ Samuel P. Huntington, *Tertib Politik Pada Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 16.

maupun dalam sikap atau budaya⁵⁰. Institusionalisasi menurut Huntington, terkait dengan kemampuan organisasi partai dalam beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Kemampuan adaptasi ini diukur dengan umur organisasi partai, frekuensi pergantian kepemimpinan, dan jumlah perubahan fungsional dalam organisasi partai. Secara lebih sederhana, Susan Scarrow⁵¹ menyatakan bahwa institusionalisasi pada prinsipnya adalah kesesuaian antara sistem, proses, prosedur dan pelaksanaannya. Dalam konteks rekrutmen politik, institusionalisasi dimaknai sebagai kesesuaian pelaksanaan proses rekrutmen politik dengan sistem, proses dan prosedur yang telah digariskan dalam kebijakan partai.

Panebianco melihat institusionalisasi partai politik dari derajat kesisteman (*systemness*), yang meliputi differensiasi dan koherensi, atau Panebianco menyebutnya sebagai faksionalisasi dan kemampuan mengontrol sumber daya dalam pelaksanaan fungsi partai politik. Selain kedua aspek tersebut, Panebianco juga menambahkan otonomi sebagai aspek dalam institusionalisasi partai politik. Sedangkan Janda, melihat institusionalisasi partai politik dari aspek *reification*, atau citra partai di mata masyarakat.

Berbagai aspek dari institusionalisasi partai politik tersebut kemudian disederhanakan oleh Vicky

⁵⁰ Ramlan Surbakti, *Perkembangan Partai Politik Indonesia*, dalam Andy Ramses M dan La Bakry (editor), *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, MIPI, Jakarta, 2009, hal. 143.

⁵¹ Susan Scarrow, *Op.Cit.*

Randall dan Lars Svasand⁵² ke dalam aspek internal-eksternal dan aspek struktural-kultural, yang meliputi 1) derajat kesisteman, 2) derajat identitas nilai, 3) derajat otonomi dan 4) derajat citra publik.

Derajat kesisteman partai politik merupakan proses dimana partai politik melaksanakan fungsi-fungsinya sesuai dengan sistem yang dibangun dalam partai, bagaimana melaksanakan fungsi-fungsi partai sesuai dengan aturan ataupun AD/ART partai politik dan aturan-aturan yang disepakati bersama dalam partai. Dalam rekrutmen politik, derajat kesisteman ini dilihat dari bagaimana pelaksanaan rekrutmen politik sesuai dengan persyaratan, prosedur dan proses yang diatur dalam kebijakan partai.

Identitas nilai adalah ciri khas yang membedakan suatu partai politik dengan partai yang lain, yang meliputi ideologi dan platform partai, sehingga bisa dipolakan basis sosial dan identifikasi konstituennya. *Otonomi keputusan* merupakan kemandirian partai politik dalam pembuatan keputusan dalam hubungannya dengan aktor-aktor di luar partai politik, baik dengan pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Citra publik merupakan pengetahuan publik tentang partai politik, yang terkait dengan gambaran dan penilaian publik tentang partai politik.

Identitas nilai dan citra publik dalam proses rekrutmen tercermin dalam kandidat yang diusung oleh partai politik. Menurut Mainwaring⁵³, hubungan antara partai dan kandidat merupakan elemen kunci dalam

⁵² Vicky Randall dan Lars Svasand, dalam *Party Politics Journal*, Vol. 8 Januari No. 1 tahun 2002, seperti dikutip Ramlan Surbakti, dalam Andy Ramses dan La Bakry, *Op.Cit.*, hal. 143

⁵³ Michael Buehler dan Paige Tan, *Op.Cit.*

melihat institusionalisasi. Pemilu yang ditentukan oleh popularitas individu akan mempengaruhi kekuatan dan instusionalisasi partai politiknya. Lebih lanjut Mainwaring menyatakan bahwa jika politik didasarkan individu dan karismanya, partai tidak perlu mengakar dalam masyarakat. Jika kandidat lebih penting secara signifikan dari partai, maka partai politik sebagai organisasi gagal dalam mendapatkan legitimasi dari pemilih⁵⁴. Identitas partai tidak didasarkan pada ideologi atau program partai, namun lebih didasarkan pada tokoh yang ada pada masing-masing partai. Partai lebih memanfaatkan ketokohan untuk memperoleh dukungan massa. Selznick membedakan antara organisasi yang terinstitusionalisasi dan yang tidak terinstitusionalisasi. Dalam organisasi yang tidak terinstitusionalisasi, anggota organisasi hanya berusaha untuk memperbesar pencapaian tujuan-tujuan mereka, sementara dalam organisasi yang terinstitusionalisasi ditandai dengan kepedulian dan komitmen untuk mempertahankan kelangsungan organisasi⁵⁵.

Dominasi pemimpin personal tidak terlepas dari lemahnya akar partai⁵⁶, sehingga tokoh-tokoh populer yang ada di partai dijadikan ujung tombak dalam memperoleh dukungan. Dominasi pemimpin personal ini berimplikasi kepada terbatasnya citra publik mengenai

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Selznick, seperti dikutip dalam Steven Levitsky, "Institutionalization and Peronism, The Concept, The Case, and The Case for Unpacking the Concept", dalam *Party Politics*, Vol. 4, No. 1, Sage Publication, tahun 1998.

⁵⁶ Dalam kondisi ini, partai cenderung menggunakan patronase politik untuk memperoleh dukungan massa. Lihat dalam Connor O'Dwyer, *Op. Cit.*

partai yang bersangkutan. Pengetahuan publik mengenai partai tidak mendalam, namun hanya sebatas pada mengenal figur yang ada dalam partai.

Keempat dimensi dari institusionalisasi partai politik tersebut yang digunakan untuk menganalisis institusionalisasi partai politik dalam disertasi ini diringkas ke dalam 3 dimensi, yaitu derajat kesisteman, identitas nilai dan citra publik, serta otonomi keputusan. Dimensi identitas nilai dan citra publik digabungkan dalam satu analisis, karena identitas nilai yang dimiliki oleh partai politik yang membangun citra partai di masyarakat. Ketiga dimensi tersebut digunakan untuk menganalisis institusionalisasi pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan dan menganalisis implikasinya dalam proses rekrutmen politik. Biasanya, rendahnya institusionalisasi diidentikkan dengan partai baru. Padahal partai yang sudah mapan sekalipun belum tentu terinstitusionalisasi.

Relevansi institusionalisasi partai politik dengan politik kekerabatan mengacu kepada tesis O'Dwyer yang menyatakan terdapat kecenderungan partai politik membangun patronase politik karena lemahnya institusionalisasi partai. Dalam konteks politik kekerabatan, maka politik kekerabatan terjadi karena lemahnya institusionalisasi partai politik. Dalam bukunya yang berjudul *Runaway State Building*, O'Dwyer menyatakan bahwa *runaway state building* didorong oleh politisi yang mencari patronase sumber daya bagi pembangunan partai⁵⁷. Hal ini terjadi karena pembangunan partai tidak didahului dengan pembangunan birokrasi. Politik kekerabatan terjadi karena lemahnya institusionalisasi partai politik dan

⁵⁷ O'Dwyer, Op.Cit., hal. 3.

dilakukan sebagai patronase sumber daya untuk kepentingan dan keberlangsungan partai politik.

6.3. Politik Kekerabatan dalam Rekrutmen Politik

Politik kekerabatan lebih mengacu kepada konsep kekerabatan politik ataupun keluarga politik. Di Amerika, politik kekerabatan mengacu kepada konsep ‘*political family*’⁵⁸. Menurut Kurtz, disebut *political family* apabila terjadi minimal dua orang yang mempunyai ikatan kekerabatan menduduki jabatan politik⁵⁹. *A political family exist when two or more relatives hold or have held public office*. Istilah lain dari *political family* adalah *political kinship*. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Casey⁶⁰:

Political kinship or political family membership is defined as either a tie of affinity or a consanguineous connection within two generations from the candidate.

(Keanggotaan kekerabatan politik atau keluarga politik didefinisikan sebagai ikatan hubungan darah ataupun hubungan pernikahan dalam dua generasi dari kandidat).

Sementara Stephen Hess menggunakan istilah dinasti politik (*political dynasty*). Menurut Stephen Hess, ‘*political dynasty as any family that has had at least four*

⁵⁸ Donn M. Kurtz II, “The Political Family: A Contemporary View”, dalam *Sociological Perspectives*, *Op.cit.*

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 55.

⁶⁰ Kimberly Lynn Casey, *Op.Cit.*

*members, in the same name, elected to federal office*⁶¹. Dinasti politik adalah suatu keluarga yang mempunyai minimal 4 anggota keluarga, terpilih dalam jabatan politik. Terdapat kerancuan dalam konsep yang dikemukakan oleh Casey, dimana dia mendefinisikan keluarga politik apabila terdapat dua anggota keluarga dalam kandidat politik, sementara di sisi yang lain, Casey memasukkan dinasti sebagai salah satu bentuk politik kekerabatan yang mengacu kepada pendapat Hess bahwa dinasti terbentuk apabila terdapat paling tidak 4 anggota keluarga menduduki jabatan politik.

Dari konsep Casey, Hess, dan Kurtz, kajian tentang politik kekerabatan lebih banyak menggunakan konsep dinasti politik (*political dynasty*), keluarga politik (*political family*) maupun kekerabatan politik (*political kinship*), namun disertasi ini menggunakan konsep politik kekerabatan. Konsep politik kekerabatan dimaksudkan untuk lebih memfokuskan pada aktifitas politik yang merekrut anggota kerabatnya dalam jabatan politik. Politik kekerabatan adalah rekrutmen politik yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan yang tidak didasarkan atas kemampuan yang dimilikinya ataupun tidak melalui prosedur yang telah digariskan, namun lebih didasarkan atas pertimbangan hubungan kekerabatannya (baik karena keturunan ataupun ikatan perkawinan). Konsep politik kekerabatan dalam konteks ini bukan mengacu kepada dinasti dalam sistem monarki yang biasanya dilakukan secara turun-temurun, namun dalam konteks demokrasi yang dihasilkan melalui proses pemilu.

⁶¹ Hess, *America's Political Dynasties*, seperti dikutip dalam Donn M. Kurtz II, *Op.Cit.*

Rekrutmen kandidat dari keluarga politik terjadi karena faktor-faktor positif yang dimiliki oleh kandidat dalam rekrutmen politik. Menurut Norris⁶², kandidat dari keluarga politik mempunyai modal politik untuk terpilih yang meliputi koneksi politik, pengalaman dalam partai politik, pengalaman pekerjaan, pendidikan, dan ketrampilan dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Dengan kata lain, kandidat dari keluarga politik mempunyai *political legacy* (legasi politik) yang diwariskan, baik pendidikan dan ketrampilan politik, nama keluarga yang dikenal publik, jaringan politik, sampai dengan pendanaan kampanye. Dalam konteks Indonesia, maraknya politik kekerabatan juga dipengaruhi oleh kekuatan oligarki dalam politik lokal. Berdasar pendapat tersebut, variabel internal keluarga politik dalam disertasi ini dijabarkan dalam pembahasan tentang sosialisasi politik dan kualitas kandidat politisi dari politik kekerabatan serta jaringan elite dan oligarki dari keluarga politik.

Sosialisasi Politik dan Kualitas Kandidat dari Keluarga Politik

Ada beberapa alasan mengapa muncul keluarga politik. Prewitt⁶³ menyebutkan ada dua alasan munculnya keluarga politik yaitu *pertama*; biasanya seorang anak meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya, dan

⁶² Pippa Norris, *Passage to Power, Legislative Recruitment in Advanced Democracies*, Cambridge University Press, 1997, seperti dikutip dalam Hilde van Liefferinge dan Kristof Stevyers, *Family Matters? Degrees of Family Politicization in Political Recruitment and Career Start of Mayors in Belgium*, dalam *Acta Politica*, Vol. 44 No. 2, Palgrave Macmillan, 2009.

⁶³ Seperti dikutip dalam Donn M. Kurtz II, *Op.Cit.*

kedua; terdapat pewarisan ketertarikannya pada politik dari orang tua kepada anaknya.

*Prewitt defines a political family as one in which children receive an overexposure to political stimuli, which makes them acquainted with the political sphere at an earlier age and renders political activity more accessible. This overexposure or strong political socialization is considered to be a very important self-recruiting mechanism among future politicians, whereas social background characteristics, functional demands or personality traits are important selection criteria*⁶⁴.

(Prewitt menjelaskan bahwa dalam suatu keluarga politik, anak-anak menerima banyak stimulan politik yang membuatnya mengetahui lingkup politik pada usia yang lebih awal dan membuat mereka lebih menerima aktifitas politik. Stimulan ataupun sosialisasi politik yang kuat dianggap sebagai hal yang sangat penting dalam mekanisme rekutmen di antara politisi di masa depan, yang mempunyai latar belakang dan berbagai aspek personal yang dibutuhkan dalam kriteria seleksi).

Dengan kata lain bahwa sosialisasi politik merupakan faktor yang sangat penting bagi terjadinya keluarga politik. Sosialisasi politik merupakan proses pewarisan nilai-nilai politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks politik kekerabatan

⁶⁴ Seperti dikutip Hilde van Liefferinge dan Kristof Steyvers, *Op.Cit.*

ini, agen sosialisasi politik yang paling kuat dilakukan oleh keluarga (orang tua) kepada anaknya. Sosialisasi yang dilakukan dalam keluarga memberikan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan politik kepada generasi penerusnya. Kajian mengenai sosialisasi politik ini sebelumnya juga dilakukan oleh Almond dan Verba di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Itali dan Mexico. Menurut Almond dan Verba, sosialisasi politik melalui diskusi politik dalam keluarga mempengaruhi perilaku politik seseorang⁶⁵. Dengan demikian, sosialisasi membentuk kualitas politik dari kader politik dalam keluarga. Meskipun dalam kajian yang dilakukan oleh Almond dan Verba sosialisasi politik tidak dikaitkan dengan politik kekerabatan, namun kajiannya menunjukkan bahwa sosialisasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam keluarga politik. Hal ini memberikan keyakinan kepada para pemilih bahwa calon yang berasal dari keluarga politik mempunyai kemampuan yang memadai untuk menduduki jabatan politik.

Senada dengan Prewitt, Martinez juga menyatakan bahwa sosialisasi politik menjadi faktor penting dalam keluarga politik.

The family, according to theories of childhood socialization, affects the acquisition of participant values; these values then determine subsequent levels of political activism, party identification, political knowledge, and sense of political efficacy. Exposure in the home to

⁶⁵ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Sage Publications, 1989, hal. 269-270.

*political talk and activism is thus linked to future political behavior*⁶⁶.

(Mengacu kepada teori sosialisasi, keluarga mempengaruhi nilai-nilai yang dimiliki anak, di mana nilai-nilai tersebut menentukan tingkat aktivisme politik, identifikasi partai, pengetahuan dan ketrampilan politiknya. Diskusi politik secara terus-menerus dan aktivisme politik dalam keluarga merupakan mata rantai bagi perilaku politik di masa yang akan datang).

Nilai-nilai politik yang diwariskan dari orang tua kepada anaknya dalam keluarga politik mempengaruhi identifikasi partai politiknya. Dalam keluarga politik di berbagai negara menunjukkan bahwa ada persamaan identifikasi partai politik dalam satu keluarga, namun dalam kasus Sulawesi Selatan menunjukkan terjadinya perbedaan identifikasi partai politik dalam satu keluarga.

Campbell et.al; menyatakan bahwa identifikasi partai politik dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua⁶⁷. Pendapat senada bahwa identifikasi partai politik dipengaruhi oleh orang tua juga dikemukakan oleh Christopher H. Achen⁶⁸ dan juga

⁶⁶ Lisa M Martinez, *Op.Cit.*

⁶⁷ Campbell et.al; seperti dikutip dalam Martin Kroh, *The Formative Period of Party Identification: Parental Education in Childhood and Adolescence*, makalah pada Annual Meeting of the American Political Science, Washington DC, September, 2010.

⁶⁸ Christopher H. Achen, "Parental Socialization and Rational Party Identification", *Political Behavior Journal*, Vol. 24, No. 2, Juni 2002.

Jennings⁶⁹. Meskipun identifikasi partai politik seorang anak dipengaruhi oleh sosialisasi politik orang tuanya, namun dalam penelitian-penelitian berikutnya menunjukkan bahwa identifikasi partai politik anak tidak selalu sama dengan identifikasi partai orang tua. Hal ini menurut Champbell, dipengaruhi oleh tingkat keaktifan orang tua dalam politik. Dalam keluarga dengan politisasi aktif dari orang tua cenderung terjadi pewarisan identifikasi partai politik, namun dalam keluarga yang pasif secara politik terdapat kecenderungan adanya kebebasan pada anak untuk memilih partai politik⁷⁰.

Anthony Down⁷¹ menyatakan bahwa identifikasi partai politik berdasar kepada pilihan yang rasional, berdasar biaya dan manfaat yang bisa diperoleh partai di masa yang akan datang. Menurut Knight dan Erickson; Levine; serta Abramovitz dan Saunders, yang mempengaruhi identifikasi partai politik adalah aspek ideologi, sementara menurut Miller dan Lockerbie; identifikasi partai politik dipengaruhi oleh pragmatisme politik⁷².

Dari teori Almond dan Verba dan pendapat Prewitts dan Martinez dapat disimpulkan bahwa

⁶⁹ Lihat dalam Richard G. Niemi dan M. Kent Jennings, "Issues and Inheritance in the Formation of Party Identification", dalam *American Journal of Political Science, Op.Cit.*

⁷⁰ Pendapat dari Champbell ini diperkuat oleh Lewis-Beck (2008) dan Kroh (2009). Seperti dikutip dalam Alexander A. Staubert, *Strength of Party Identification: A Cross-National Comparison of Individual and Contextual Determinant*, Thesis pada department of Political Science, University of Oslo, 2012.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Kenneth Janda, *Toward A Performance Theory of Change in Political Parties*, Department of Political Science, Northwestern University, 1990.

sosialisasi politik dalam keluarga ikut menentukan kelangsungan keluarga politik karena terdapat pewarisan pengetahuan dan ketrampilan politik, sehingga kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik. Thesis inilah yang akan dianalisis dalam disertasi ini.

Kualitas kandidat adalah karakteristik yang dimiliki oleh kandidat yang memungkinkan baginya untuk dipilih dalam jabatan politik dan menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang politisi⁷³, namun demikian belum ada indikator yang baku untuk mengukur kualitas kandidat. Kualitas ataupun kompetensi politik, menurut Almond dan Verba, dipengaruhi oleh partisipasi ataupun pengalaman politik sebelumnya, antara lain partisipasi dalam keluarga, sekolah maupun pekerjaan. Lebih lanjut Almond dan Verba menyatakan bahwa pengaruh partisipasi dalam keluarga, sekolah dan pekerjaan terhadap kompetensi bersifat kumulatif⁷⁴. Semakin aktif dalam politik, semakin baik kompetensinya. Menurut Jacobson dan Kernell⁷⁵, kualitas kandidat diukur dari pengalaman politik sebelumnya.

Dari pendapat tersebut maka kualitas kandidat dalam penelitian ini meliputi tiga variabel yaitu pendidikan, pelatihan dan pengalaman politik yang dimiliki oleh kandidat. Pengalaman politik dalam penelitian ini dilihat dari tiga aspek yaitu aktifitasnya

⁷³ Gary C. Jacobson dan Samuel Kernell, "Strategy and Choice in Congressional Elections", New Haven: Yale University Press, 1983, seperti dikemukakan dalam L. Sandy Maisel, Walter J. Stone, dan Cherie Maestas, *Op.Cit.*

⁷⁴ Gabriel A. Almond dan Sidney Verba, *Op.Cit.*, hal. 301.

⁷⁵ *Ibid.*

dalam partai politik, pengalaman dalam organisasi, dan pengalaman dalam pekerjaan sebelumnya. Analisis tentang kualitas kandidat tersebut digunakan untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan yang mengacu kepada teori sosialisasi dari Almond dan Verba serta Prewitt dan Martinez.

Jaringan Elite dan Patron-Klien Keluarga Politik

Jaringan Elite. Untuk memahami politik kekerabatan dalam dinamika politik lokal di Sulawesi Selatan, perlu memahami konsep elite dan kekuasaan. Elite adalah fenomena umum yang ada dalam setiap masyarakat. Elite merupakan penggolongan kelas ranking teratas dalam setiap masyarakat. Pareto⁷⁶ membagi elite dalam dua katagori yaitu *a governing elite* (elite yang memerintah) dan *non-governing elite* (elite yang tidak memerintah) namun mempunyai pengaruh terhadap elite yang memerintah. Sementara Mosca juga membagi masyarakat dalam dua kelas yaitu kelas yang berkuasa (minoritas) dan kelas yang dikuasai (mayoritas)⁷⁷.

Berbeda dengan Pareto dan Mosca, Suzanne Keller⁷⁸ memberikan perhatian kepada *strategic elite*,

⁷⁶ Klasifikasi ini didasarkan pada stratifikasi dalam masyarakat dimana terdapat strata atas dan strata bawah. Strata atas itulah yang disebut dengan elite, baik yang memerintah maupun yang tidak memerintah. Lihat dalam T.B. Bottomore, *Elites and Society*, New York: Penguin Books, 1982, hal. 8

⁷⁷ Seperti dikutip dalam Ronald H Chilcote, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 477.

⁷⁸ Suzanne Keller, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, terjemahan, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.

sebagai elite penentu yang ikut mempengaruhi *the ruling elite*. Elite penentu ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan spesialisasi, baik elite intelektual, agama, seni, elite bisnis maupun elite militer. *The ruling elite* biasanya berasal dari elite penentu yang kemudian bergabung dalam partai politik. Posisi elite dalam masyarakat bisa diturunkan karena adanya hak-hak istimewa yang melekat pada elite, namun karena perkembangan ilmu dan teknologi, posisi elite berdasar keturunan semakin memudar, dan digantikan oleh elite atas dasar prestasi⁷⁹. Posisi elite bisa diperjuangkan melalui usaha dan kerja keras anggota masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan⁸⁰. Sirkulasi elite menurut Suzanne Keller, biasanya terjadi dari elite penentu ke elite penguasa, dan setelah tidak berkuasa biasanya kembali lagi menjadi elite penentu. Konsep Suzanne Keller tentang elite dan sirkulasi elite ini lebih sesuai untuk menganalisis politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, terutama bagaimana interaksi antara elite penentu dengan elite penguasa dalam politik lokal di Sulawesi Selatan, serta jaringan antar elite dari keluarga politik.

Kekuasaan keluarga politik di Sulawesi Selatan juga dapat dilihat dari teori sumber daya kekuasaan elite yang memfokuskan hubungan antara sumber daya, posisi, dan *network*⁸¹. Menurut Collin, elite mempengaruhi jaringan melalui interaksi *face to face*⁸².

⁷⁹ Mundurnya elite berdasar keturunan menurut Suzanne Keller ini berdasar perkembangan elite di Amerika Serikat. *Ibid.*, hal 255.

⁸⁰ *Ibid*, hal. 308 – 309.

⁸¹ Alexis Yamokoshi dan Joshua Kjerulf Dulbrow, "How Do Elite Define Influence ? Personality and Respect as Source of Social Power", dalam *Sociological Fokus*: November 2008, 41.4. hal. 319.

⁸² *Ibid*.

Hal ini seperti diungkapkan dalam perspektif neo institusionalisme, bahwa jaringan sosial ikut menentukan dalam proses pembuatan kebijakan. Bila ditinjau dari tujuan hubungan sosial yang membentuk jaringan-jaringan sosial yang ada dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi tiga jenis jaringan sosial yaitu⁸³:

1. Jaringan *interest* (jaringan kepentingan) dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan kepentingan.
2. Jaringan sentimen (jaringan emosi) yang terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermuatan emosi.
3. Jaringan *power*, dimana hubungan-hubungan sosial yang membentuknya adalah hubungan-hubungan sosial yang bermuatan power.

Perilaku elite dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan biasanya dilakukan melalui ketiga jaringan tersebut. Biasanya, dalam interaksi tersebut melalui proses-proses *power* dan konflik serta proses *bargaining* antar aktor.

Jaringan patron-klien. Dalam konteks Sulawesi Selatan, stratifikasi sosial dalam masyarakat berbeda-beda antara Wajo, Bone, Gowa dan Bantaeng⁸⁴. Secara umum pelapisan sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan terdiri dari kaum keturunan raja (*To-manurung*), kaum bangsawan, kaum maradeka, dan budak. Eerdmans⁸⁵ menggambarkan masyarakat Gowa dalam

⁸³ Ruddy Agustyanto, *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hal. 34-35.

⁸⁴ Lihat dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Op.Cit.*, hal. 83 – 100.

⁸⁵ Seperti dikutip dalam Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Ibid.*, hal. 97-98. Golongan gadai adalah orang-orang yang harus taat kepada perintah

empat golongan, yaitu golongan bangsawan, golongan menengah, budak, dan orang-orang gadai. De Graaf menyebutkan tiga pelapisan sosial yaitu keluarga raja, kaum bangsawan, dan *ata* atau masyarakat biasa⁸⁶. Dari stratifikasi tersebut, konsep elite di Sulawesi Selatan mengacu kepada keluarga raja dan kaum bangsawan. Keluarga bangsawan merupakan strata sosial yang tinggi dan dihormati dalam masyarakat Sulawesi Selatan. Keluarga bangsawan pada umumnya mempunyai tanah yang luas dan bekerja sebagai pegawai pemerintah dan politisi⁸⁷. Menurut H.J De Graaf, konsep kebangsawanan ini sama dengan konsep aristokrasi dalam masyarakat Eropa. Hal ini tidak terlepas dari aspek historis Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dari beberapa kerajaan. Kekuasaan politik dan pemerintahan dipegang oleh kaum aristokrat. Dalam konsep Plato, aristokrasi merupakan bentuk pemerintahan terbaik di mana kekuasaan dipegang oleh orang-orang bijak, yang dimiliki oleh kaum aristokrat.

Politik kekerabatan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hubungan patron-klien atau *punggawa sawi*. Hubungan patron-klien menurut Scott⁸⁸ :

seseorang tempat dia berhutang, sebelum dia dapat melunasi hutangnya.

⁸⁶ J.J. De Graaf menyebutkan bahwa di Makassar terdapat lapisan atas adalah raja, lapisan kedua para bangsawan, dan lapisan ketiga 'ata'. Sementara menurut Friedericy lapisan masyarakat Bugis dan Makassar disederhanakan dalam dua lapisan yaitu lapisan pertama raja dan kaum bangsawan, dan lapisan kedua 'ata' atau masyarakat biasa. Lihat dalam Mattulada, *Op,cit.*, hal. 13.

⁸⁷ Tri Ratnawati, dalam Syamsudin Haris, *Op.Cit.*, hal. 245.

⁸⁸ James C. Scott, Patron Client Politics and Political Change in Southeast Asia, *The American Political Science Review*, Vol. 66, Maret 1972.

The patron-client relationship-an exchange relationship between roles-may be defined as a special case of dyadic (two-person) ties involving a largely instrumental friendship in which an individual of higher socioeconomic status (patron) uses his own influence and resources to provide protection or benefits, or both, for a person of lower status (client) who, for his part, reciprocates by offering general support and assistance, including personal services, to the patron.

(Hubungan patron-klien...didefinisikan sebagai suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental di mana individu yang mempunyai status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan ataupun manfaat ataupun kedua-duanya kepada seseorang yang kedudukannya lebih rendah (klien) yang pada gilirannya membalasnya dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan, termasuk pelayanan personal kepada patron).

Menurut Scott⁸⁹, jaringan patron tidak hanya berfokus pada ego, namun mengacu kepada keseluruhan jaringan patron-klien (termasuk secara horisontal, aliansi patron). Variasi ikatan patron-klien berdasar pada sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, di mana patron mempunyai sumber daya berupa keahlian, pengetahuan, kekayaan maupun otoritas, dan di sisi yang lain klien mempunyai sumber daya berupa pelayanan

⁸⁹ James C. Scott, *Ibid.*

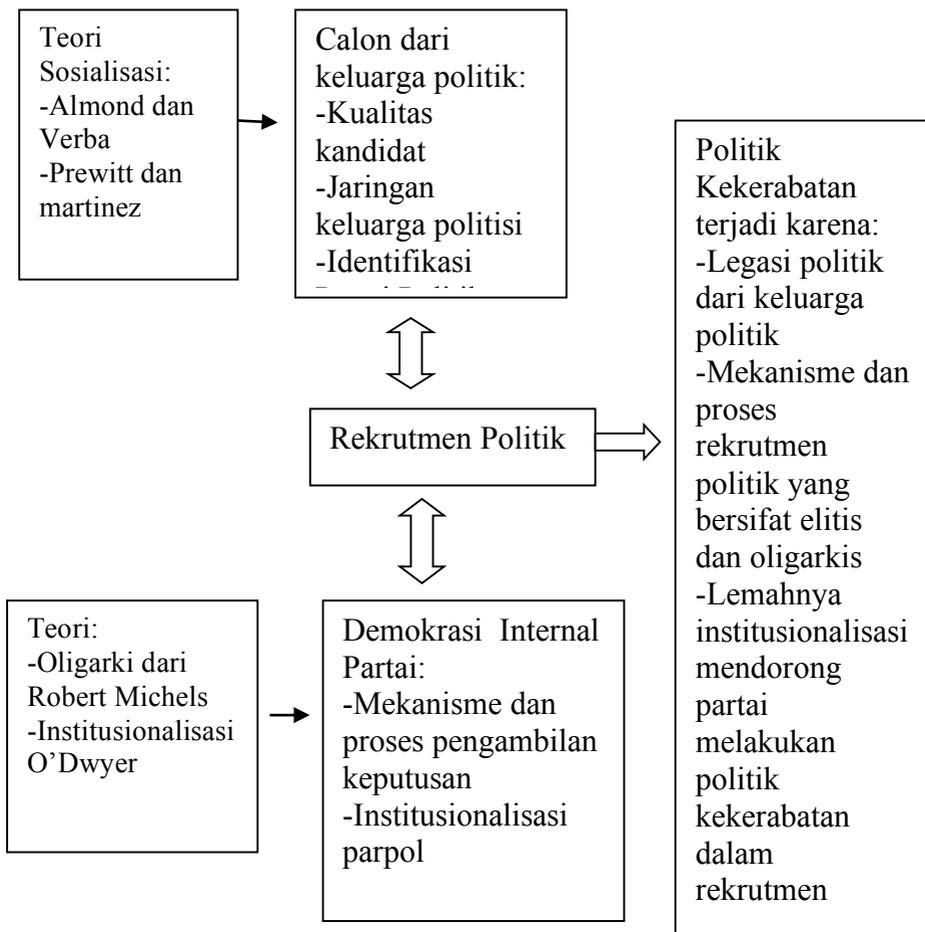
tenaga kerja, tugas-tugas kemiliteran, maupun pelayanan dalam bentuk dukungan politik. Scott lebih lanjut menyatakan bahwa terdapat dua bentuk hubungan patron-klien yaitu bentuk pola gugus (*patron-client cluster*) dan piramida (*patron-client pyramid*)⁹⁰. Pola gugus adalah bentuk hubungan patron-klien di mana terdapat satu patron dengan beberapa klien, sedangkan bentuk piramida terdapat beberapa gugus patron-klien yang dipimpin oleh seorang patron yang tertinggi yang merupakan patron bagi patron gugus-gugus yang lebih kecil.

Dalam hubungan patron-klien yang berbentuk piramida, hubungan patron-klien ini mempunyai 3 karakter yaitu ketidakpersamaan (*inequality*), sifat tatap muka (*face to face character*), dan sifat fleksibilitas yang meluas (*diffuse flexibility*)⁹¹. Ketiga karakter tersebut menjadikan hubungan patronase tidak pernah seimbang, melibatkan ikatan emosional yang cukup kuat dan meluas baik melalui ikatan kekerabatan, etnis, agama, status sosial maupun pekerjaan. Hubungan patron-klien yang berbentuk piramida ini akan digunakan dalam menganalisis jaringan yang dimiliki keluarga politik dalam proses rekrutmen politik di Sulawesi Selatan.

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ *Ibid.*

7. Alur Pemikiran Penelitian



Analisis proses rekrutmen politik yang melahirkan politik kekerabatan di Sulawesi Selatan dilihat dari aspek kandidat dari keluarga politik dan aspek organisasi partai. Aspek kandidat dari keluarga politik berpijak kepada teori Almond dan Verba tentang sosialisasi politik maupun Prewitts dan Martinez yang mengkaitkan sosialisasi politik dengan faktor yang mempengaruhi perkembangan politik kekerabatan. Sosialisasi politik dalam keluarga politik mewariskan modal politik yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik, baik kualitas kandidat, jaringan politik, maupun identifikasi partai politik.

Pada aspek organisasi partai, rekrutmen politik dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen dan proses pengambilan keputusan serta institusionalisasi partai politik. Mekanisme rekrutmen mengacu kepada teori Reuven Hazan tentang inklusifitas dan eksklusifitas mekanisme rekrutmen. Proses pengambilan keputusan dalam rekrutmen juga menggunakan teori Michels tentang oligarki partai. Dengan menggunakan indikator institusionalisasi dari Vicky Randall dan Lars Svasand, penelitian ini juga menganalisis pengaruh institusionalisasi terhadap rekrutmen politik yang melahirkan politik kekerabatan, berdasar thesis dari O'Dwyer bahwa institusionalisasi partai politik yang lemah mendorong partai politik melakukan patronase politik.

8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang didukung data kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan serta mendeskripsikan

fenomena sosial politik dan realitas sosial politik mengenai politik kekerabatan dalam politik lokal di Provinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam proses rekrutmen politik. Penelitian ini termasuk dalam *exploratory research* yang merupakan karakter dari penelitian kualitatif.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus mengacu kepada penelitian yang memfokuskan pada suatu kasus yang unik, baik yang menyangkut individu, organisasi, kejadian, program maupun proses⁹². Penelitian studi kasus ini bersifat *interpretif*⁹³ yang menekankan pada interpretasi makna atas fenomena sosial, yang mempelajari pandangan-pandangan khusus pada pelaku atau makna-makna lokal⁹⁴. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah politik kekerabatan dalam politik lokal di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam proses rekrutmen politik yang dilakukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan, dengan fokus kajian pada variabel internal partai politik dalam rekrutmen politik yaitu variabel organisasi partai, dan variabel internal politisi dari kekerabatan dalam membentuk politik kekerabatan.

Teknik analisisnya adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis proses rekrutmen politik,

⁹² Kjell Erik Rudestam dan Rae R. Newton, *Surviving Your Dissertation, A Comprehensive Guide to Content and Process*, Sage Publications, California, 2007, hal. 49.

⁹³ Penelitian yang bersifat interpretif sering juga disebut sebagai penelitian yang bersifat reflektif. Lihat dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 309.

⁹⁴ *Ibid.*

kualifikasi kandidat, demokrasi internal partai dan institusionalisasi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi partai politik dalam merekrut politisi dari politik kekerabatan. Namun demikian untuk memperkuat analisis kualitatif, penelitian ini didukung dengan data kuantitatif yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif mengenai kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (*in depth-interview*) dan dokumentasi. Wawancara mendalam merupakan metode utama dalam pengumpulan data. Wawancara mendalam dilakukan terhadap sejumlah informan, yaitu aktor-aktor dari keluarga politik yang memperoleh jabatan politik pertama kalinya pada pemilu 2009, pengurus partai politik dan tokoh masyarakat yang dilakukan menggunakan metode *snow-ball* sehingga memperoleh data-data dari pihak yang terkait dengan fenomena politik yang diteliti. Dengan demikian akan selalu dilakukan cek dan ricek atas data-data yang diperoleh dengan menggunakan metode *triangulasi* untuk memperkuat validitas data. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan melalui dokumen-dokumen mengenai aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya dari masyarakat provinsi Sulawesi Selatan, produk perundangan dan peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pemilu, pilkada, dan demokrasi serta data-data dokumen yang berasal dari penelitian sejenis serta berita-berita dari media massa.

9. Hasil Penelitian

Ada beberapa temuan penelitian dari disertasi ini yaitu *pertama*; berkembangnya fenomena politik

kekerabatan di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu akar politik kekerabatan, legasi politik yang dimiliki oleh politisi dari politik kekerabatan, dukungan budaya dan kesempatan politik.

Tabel 4...: Akar Politik Kekerabatan di Sulawesi Selatan

No	Keluarga Politik	Kebang-sawanan	Karir Awal	Jabatan	Keterangan
1	Yasin Limpo	Bangsawan Gowa	Militer masa kemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru	Bupati di berbagai daerah	Keluarga Politik terbentuk sejak Orde Baru
2	Amin Syam	Bangsawan Bone	Militer Masa Orba	Bupati Enrekang	Keluarga Politik terbentuk pada masa reformasi
3	Padjalangi	Bangsawan Bone	Akademisi	Wakil rektor Unhas	Keluarga Politik terbentuk era reformasi
4	Idris Galigo	Bangsawan Bone	Birokrat	Bupati Bone	Keluarga Politik terbentuk masa reformasi
5	Ilham Arief Sirajuddin	Bone	Pengusaha	Anggota DPRD Sulsel 1999-2004	Keluarga Politik terbentuk masa reformasi
6	Abdul Hadi Djamal	Tokoh Agama	Pengusaha	Anggota DPR RI 2004-2009	Keluarga Politik terbentuk masa reformasi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Akar politik kekerabatan. Tabel 4 menunjukkan bahwa akar politik kekerabatan di Sulawesi

Selatan berasal dari dua pilar kekuasaan Orde Baru yaitu militer dan birokrasi, pengusaha dan tokoh agama, yang biasanya juga merupakan keluarga bangsawan di Sulawesi Selatan.

Legasi Politik. Keberadaan keluarga politik di Sulawesi Selatan sebagaimana thesis dari Almond dan verba maupun Prewitt dan Partinez dipengaruhi oleh adanya sosialisasi politik dalam keluarga, dan sosialisasi politik dalam keluarga mempengaruhi kapasitas ataupun kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik.

Tabel 5.: Indeks Kualitas Kandidat dari Keluarga Politik (KP) di Sulawesi Selatan

Periode	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	Rerata Indeks	Keterangan indeks
Orde Baru	2,62	2,57	-	-	-	2,59	< 1,67= rendah 1,67-2,33= sedang >2,33= tinggi
1999-2004	1,78	-	2,37	2,37	2,40	2,42	
2004-2009	2,15	1,83	2,12			1,82	
2009-2014	1,48	-	2,05	1,27	1,93	1,68	

Sumber: Olah data

Sosialisasi politik mempengaruhi kualitas kandidat, namun Tabel 5 menunjukkan kualitas kandidat yang berasal dari keluarga politik pada waktu memperoleh jabatan politik pertama kali cukup beragam. Semakin panjang generasi dalam keluarga politik, kualitas kandidat semakin menurun. Penurunan ini dipengaruhi oleh usia dalam memperoleh jabatan politik pertamakali yang semakin muda, tercermin dalam tabel 6.

Tabel 6. Umur Kandidat dari Keluarga Politik (KP) di Sulawesi Selatan dalam memperoleh jabatan politik pertama

Periode	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	Rerata Umur
Orde Baru	39	43	-	-	-	40,5
1999-2004	38	-	39	34	53	39,4
2004-2009	43	31	39			34,5
2009-2014	27	-	36	24	34	30,3

Sumber: Olah data

Selain sosialisasi politik, bentuk legasi politik yang lain adalah pewarisan organisasi sosial/jaringan kepentingan (kesamaan aktifitas dalam organisasi sosial seperti AMPI, KNPI, FKPPi), jaringan emosi (kekerabatan, etnis), dan jaringan kekuasaan (partai politik). Namun demikian, indentifikasi partai orang tua dengan anak ataupun kerabatnya tidak selalu sama yang dipengaruhi oleh kepentingan pragmatis. Pewarisan aktifitas politik dengan memanfaatkan jaringan yang ada biasanya didahului dengan kajian politik (survey melalui konsultan politik) sehingga majunya kandidat dari keluarga politik disertai dengan strategi untuk memenangkan dukungan rakyat, termasuk dalam pembagian daerah pemilihan (dapil).

Dukungan Budaya. Budaya di Sulawesi Selatan, terutama patron-klien dan stratifikasi sosial dalam masyarakat cukup menentukan dalam keberadaan keluarga politik. Jaringan patronase berdasarkan status kebangsawanan dan etnis masih cukup kuat, yang didukung dengan patronase ekonomi. Hubungan patron-klien ini semakin kuat yang didukung dengan budaya *siri*'

(terkait dengan rasa malu dan harga diri) dan *pesse/pacce* (solidaritas) yang membentuk ikatan antara patron dengan kliennya. Mengacu kepada Scott, jaringan patron-klien dalam bentuk piramida semakin memperkuat posisi politik dan kekuasaan patron.

Kesempatan Politik. Adanya kesempatan politik, terutama dengan demokrasi langsung (pilkada langsung), sistem multi partai, sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kandidat dari keluarga politik, terutama dari keluarga politik dengan pendanaan yang memadai untuk memenangkan pemilu/pilkada. Tabel 7 menunjukkan bahwa pada era reformasi ini, jumlah anggota keluarga politik yang memperoleh jabatan politik semakin banyak.

Tabel 7.: Jumlah Anggota Keluarga Politik dalam
Jabatan Politik

Periode	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	Jumlah
Orde Baru	2	1	-	-	-	3
1999-2004	3	1	1	1	-	6
2004-2009	5	1	2	1	1	10
2009-2014	6	1	3	2	2	14

Sumber: Olah data

Kedua, dari organisasi partai, dilihat dari sumber rekrutmen politik, kriteria seleksi, tim seleksi dan penentu kebijakan, serta aspek institusionalisasi partai politik terdiri dari derajat kesisteman, identitas nilai dan citra publik serta otonomi keputusan, tercermin dalam Tabel 8. .

Sumber Rekrutmen. Dilihat dari rekrutmen politik dari ketiga partai, Partai Golkar mengandalkan kader internal partai. Hampir semua caleg dari keluarga Partai Golkar merupakan kader partai, meski terdapat caleg yang bukan kader partai namun berasal dari keluarga kader partai. (Hal ini karena partai Golkar merupakan partai yang sudah punya pengalaman panjang dan mempunyai mekanisme pengkaderan yang relatif lebih mapan daripada PAN dan Partai Demokrat. PAN dan Partai Demokrat memberi kesempatan kepada calon yang berasal dari luar kader. Kandidat dari keluarga politik pada Partai Demokrat berasal dari luar kader. Meskipun rekrutmen terbuka lebih demokratis dan memberi peluang calon yang lebih berkualitas, namun menunjukkan bahwa proses pengkaderan dalam internal partai belum memenuhi kebutuhan partai.

Kriteria Seleksi. Dari ketiga partai, mekanisme dan prosedur dalam rekrutmen sudah diatur dalam AD ART maupun peraturan partai. Pada prinsipnya, kriteria caleg dalam rekrutmen politik adalah mempunyai kapasitas dan elektabilitas. Faktor elektabilitas lebih menentukan dalam rekrutmen caleg yang didasarkan pada survey yang dilakukan oleh masing-masing partai. Dilihat dari komposisi caleg terpilih, sebagian besar caleg dari ketiga partai berasal dari nomor urut atas, kecuali caleg dari keluarga politik yang meskipun ditempatkan pada nomor urut bawah tetap memperoleh dukungan masyarakat yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses rekrutmen memperhatikan aspek keaktifan di partai politik sekaligus aspek elektabilitas caleg, selain itu, bisa berarti bahwa penempatan pada nomor urut atas menguntungkan calon.

Tabel 8.: Perbandingan Organisasi Partai dalam Rekrutmen Politik: Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan

	Partai Golkar	Partai Amanat Nasional	Partai Demokrat
Sumber rekrutmen	Kader	Kader dan non kader	Kader dan non kader
Kriteria	PD2LT dan elektabilitas	Kualitas, <i>track record</i> , elektabilitas	Kompetensi, integritas dan elektabilitas
Tim Seleksi	Pengurus Partai	Pengurus Partai	Pengurus Partai
Penentu kebijakan	Elite partai (tim7)	Elite partai (rapat pleno)	Elite partai (pengurus harian terbatas)
Institusionalisasi:			
Derajat kesisteman	Mekanisme rekrutmen terstruktur dan terstandarisasi dengan sumber daya memadai. Kader berlimpah	Mekanisme rekrutmen terstruktur dan terstandarisasi dengan sumber daya cukup. Kader cukup	Mekanisme rekrutmen terstruktur dan terstandarisasi dengan sumber daya memadai. Kader cukup
Otonomi	Otonom, dipengaruhi kekuatan aktor	Otonom, elitis	Otonom, elitis
Identitas Nilai	Warisan Orba dan tokoh	Tokoh	Tokoh
Citra Publik	Pada Tokoh	Pada Tokoh	Pada Tokoh
Perolehan suara pemilu 2004	44,25 %	6%	3 %
Perolehan suara pemilu 2009	25,10 %	8%	15,7 %
% kenaikan/penurunan	-19,15%	+2%	+12,7 %
Politik Kekerabatan (PK)	Ya	Ya	Ya

Jumlah caleg Keluarga Politik (KP)	10	6	10
Jumlah caleg KP yang terpilih	9	3	6
Tingkat keterpilihan kandidat KP	90 %	50 %	60 %
Sumber politik kekerabatan	Militer dan Birokrasi Orde Baru, bangsawan	Tokoh Agama, pengusaha	Pengusaha, bangsawan
Munculnya politik kekerabatan	Kaderisasi	Proses pembentukan partai dan rekrutmen non-kader	Proses pembentukan partai dan rekrutmen non kader

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tim Seleksi dan Penentu Kebijakan. Dalam proses seleksi caleg, masing-masing partai membentuk tim seleksi caleg, namun dalam proses pengambilan keputusan dalam menentukan caleg berada pada pimpinan partai, sesuai dengan tingkatan kepengurusan partai. Pada Partai Golkar, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat tim yang terdiri dari pengurus partai, sedangkan pada Partai Demokrat hanya ditentukan oleh pengurus inti. Partai Amanat Nasional yang menentukan caleg dengan mekanisme yang lebih luas yaitu rapat pleno partai pada tingkatan sesuai dengan tingkatan pencalonannya. Secara prosedural, pengambilan keputusan didesentralisasikan sesuai dengan tingkatan pencalonan. Seleksi caleg untuk DPRD kabupaten/kota dilakukan oleh tim seleksi atupun kepengurusan partai tingkat kabupaten/kota. Caleg tingkat provinsi diseleksi oleh tim di tingkat provinsi. Namun demikian, peran dari elite pada masing-masing

partai cukup dominan. Partai Golkar yang mempunyai kader dan tokoh yang cukup banyak, dalam pembuatan keputusan terkadang muncul faksi-faksi yang merupakan manifestasi kompetisi antar aktor dalam partai, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kekuatan faksi ataupun kekuatan aktor. Dari ketiga partai, aspek ketokohan masih menjadi aspek penting dalam memperoleh dukungan publik, apalagi dengan mekanisme yang berdasarkan suara terbanyak.

Dari rekrutmen politik pada ketiga partai politik, meskipun tim seleksi berupaya untuk melakukan seleksi sesuai dengan garis kebijakan partai, namun tetap mengakomodasi caleg dari keluarga ataupun elite partai. Dari perspektif teori rekrutmen politik dari Reuven Hazan, rekrutmen politik cenderung eksklusif yang hanya ditentukan oleh elite partai, meskipun dengan mempertimbangkan elektabilitas caleg. Tim seleksi yang sekaligus merupakan pengurus partai, dan beberapa anggota tim seleksi juga sekaligus merupakan caleg membuat keputusan yang dibuat bias kepentingan elite. Hal ini sekaligus memverifikasi teori dari Michels tentang oligarki partai. Namun demikian, thesis Michels tentang kecenderungan oligarki dalam organisasi yang menyatakan bahwa oligarki berkembang seiring dengan perkembangan organisasi, perlu direvisi. Dalam kasus pembentukan partai baru seperti PAN dan Partai Demokrat, oligarki muncul sejak awal pembentukan organisasi yang dipengaruhi oleh budaya kekerabatan yang cukup kuat sehingga lebih mengandalkan keluarga dalam pembentukan organisasi partai. Kecenderungan oligarki tidak muncul setelah perkembangan organisasi, namun sejak awal pembentukan organisasi.

Derajat Kesisteman. Mekanisme pengkaderan dan rekrutmen caleg maupun kepala daerah sudah diatur dalam kebijakan partai, baik dalam AD/ART partai maupun keputusan partai. Dalam pelaksanaannya, pragmatisme partai maupun pragmatisme aktor membuat aturan partai tidak ditegakkan secara konsisten. Dalam partai Golkar, mekanisme internal partai kadang membuat aktor berjalan di luar garis kebijakan partai, namun tidak memperoleh sanksi yang tegas dari partai. Kasus beberapa calon tandingan dalam pilkada menunjukkan tidak solidnya kebijakan partai. Kekecewaan yang terjadi dalam tubuh partai, dan adanya kesempatan dan peluang untuk memperoleh kekuasaan melalui partai-partai yang lain membuat Partai Golkar kehilangan kader-kadernya. Karena kuatnya peran aktor, hilangnya kader membawa serta konsituennya sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara partai. Pada PAN dan Partai Demokrat, banyaknya kandidat yang berasal dari luar kader menunjukkan bahwa sistem internal partai, terutama pengkaderan belum berjalan baik. Rekrutmen non-kader yang dilakukan elite partai memperbesar peran elite dalam rekrutmen politik.

Identitas Nilai dan Citra Publik. Tidak ada perbedaan mendasar tentang identitas ideologis antara Partai Golkar, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat. Ketiganya merupakan partai nasionalis yang inklusif, meskipun PAN merupakan partai yang berbasis massa Islam. Identitas partai dan citra partai melekat pada tokoh-tokoh yang ada di partai. Tokoh Golkar merupakan tokoh-tokoh lama yang sudah dipercaya oleh rakyat, sementara partai baru justru membangun patronase dengan tokoh-tokoh yang berasal dari partai Golkar ataupun keluarga Partai Golkar.

Pada Partai Demokrat, faktor ketokohan SBY juga berpengaruh terhadap keterpilihan caleg. Dari ketiga partai, caleg yang berasal dari keluarga politik juga merupakan pengurus partai politik. Dalam kasus PAN dan Partai Demokrat, sebagai partai baru yang dibentuk dari atas, proses pembentukan partai di tingkat lokal masih mengandalkan orang-orang terdekat partai, dalam hal ini adalah keluarga. Sehingga deklarator partai pada tingkat lokal banyak dilakukan oleh anggota keluarga. PAN melalui keluarga KH Djameluddin Amien dan Partai Demokrat melalui keluarga Reza Ali. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan oligarki tidak terjadi seiring perkembangan organisasi, namun sejak awal pembentukan organisasi partai

Otonomi Keputusan. Pengambilan keputusan pada ketiga partai relatif otonom, dalam arti tidak ada intervensi kekuatan dari luar partai. Hanya saja, kadang terjadi konflik kepentingan antar aktor dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil ditentukan oleh aktor-aktor yang berpengaruh.

Keluarga Politik dan Tingkat Keterpilihan Calon. Meskipun institusionalisasi partai Golkar relatif lebih baik karena pengalaman panjangnya dalam berpolitik, namun Partai Golkar menghadapi masalah terus tergerusnya dukungan masyarakat kepada partai karena munculnya partai-partai baru. Sebagai partai dengan sistem pengkaderan yang sudah mapan, semestinya tidak mengandalkan pada patronase politik sebagaimana yang dinyatakan O'Dwyer. O' Dwyer menyatakan bahwa patronase politik terjadi karena lemahnya institusionalisasi partai politik. Pada kenyataannya, fenomena politik kekerabatan terjadi pada ketiga partai. Perbedaan partai Golkar dengan partai

lainnya adalah bahwa hampir semua calon yang berasal dari keluarga politik pada Partai Golkar berasal dari kader partai. Politisi yang berasal dari keluarga politik pada partai Golkar telah lama berkibrah dalam organisasi partai, terutama mulai pada organisasi sayap dan organisasi afiliasi partai Golkar seperti AMPI, Kosgoro, maupun Soksi. Pewarisan politik dari keluarga juga dalam bentuk keaktifan mereka pada organisasi-organisasi sosial politik. Organisasi AMPI ataupun KNPI misalnya, biasanya diketuai oleh anak dari penguasa daerah seperti Bupati ataupun Walikota. Keaktifan dalam organisasi sayap ataupun organisasi afiliasi partai merupakan pintu masuk dalam partai politik.

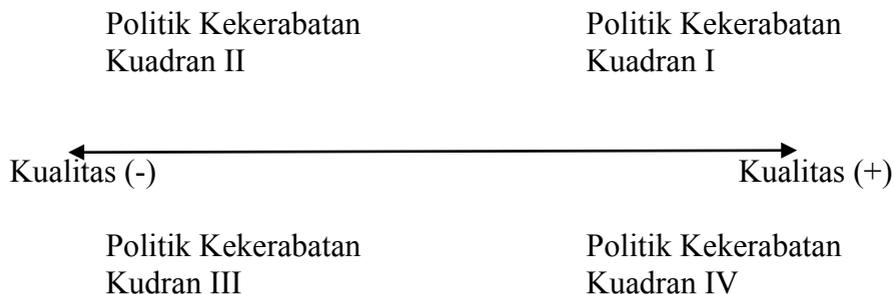
Tingkat keterpilihan calon keluarga politik dari partai Golkar juga cukup tinggi karena hampir semua calon dari keluarga politik terpilih dalam pemilu. Hanya satu caleg yang tidak terpilih, yang lebih disebabkan oleh persaingan antar sesama calon kekerabatan dari dapil yang sama.

Ketiga, berdasarkan prosedur rekrutmen politik dan kualitas kandidat, analisis terhadap politik kekerabatan dilakukan dengan membedakan fenomena politik kekerabatan dalam 4 kuadran

Bagan Politik Kekerabatan

Prosedural





Non-Prosedural

Kuadran I merupakan politik kekerabatan yang dihasilkan dari seleksi prosedural yang dilakukan partai dan mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen. Politik kekerabatan kuadran I sebenarnya bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan, meski menghasilkan pejabat politik/pemerintahan yang berasal dari keluarga politik. Politik kekerabatan kuadran II yaitu politik kekerabatan yang dihasilkan dari mekanisme prosedural namun kandidat terpilih tidak memenuhi kualifikasi. Politik kekerabatan kuadran III yaitu politik kekerabatan yang dihasilkan dari mekanisme yang tidak prosedural dan tidak memenuhi kualifikasi. Politik kekerabatan kuadran IV yaitu politik kekerabatan yang dihasilkan dari mekanisme non-prosedural namun memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik. Politik kekerabatan kuadran II, III dan IV merupakan manifestasi politik kekerabatan., yang lebih mengandalkan popularitas untuk mendulang suara.

Berdasarkan analisis pada keempat kuadran tersebut, dari 6 kandidat dari keluarga politik di Sulawesi Selatan, 2 kandidat berada pada kuadran I, 3 kandidat berasal dari kuadran III dan satu kandidat berada pada kuadran IV. Dengan demikian, dari 6 kandidat, 2 kandidat bukan merupakan manifestasi dari politik kekerabatan meskipun berasal dari keluarga politik, dan 4 kandidat terindikasi sebagai manifestasi dari politik kekerabatan.

Keempat, berdasar model rekrutmen dan kualitas kandidat dari ketiga partai, disertasi ini menghasilkan 3 tipologi politik kekerabatan, yaitu politik kekerabatan oligarki meritokratik, politik kekerabatan transaksional dan politik kekerabatan pragmatis, seperti dalam tabel 9.

Tabel 9. : Karakter Politik Kekerabatan dalam Rekrutmen Politik pada Partai Golkar, PAN dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan

	Partai Golkar	PAN	Partai Demokrat
Mekanisme rekrutmen	Demokrasi Prosedural,	Elitis (non-prosedural)	Elitis (non-

	cenderung oligarkis		prosedural)
Sumber Rekrutmen	Kaderisasi, kompetensi	Kader dan non-kader, balas jasa dan sumber daya kandidat	Kader dan non-kader, pragmatis jangka pendek
Kualitas kandidat dari politik kekerabatan	Sedang	Rendah	Rendah
Model Rekrutmen	Partisan-meritokratik	Transaksional	Pragmatis
Karakter politik kekerabatan	Oligarki-meritokratis	Transaksional	Pragmatis

Karakter politik kekerabatan dalam Tabel 9 tersebut juga dikaitkan dengan model rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik. Mengacu kepada Barbara Geddes⁹⁵, terdapat 4 model rekrutmen yaitu *pertama*; *partisanship*; *meritocratic*, *compartementalization* dan *survival*. Meskipun 4 model rekrutmen tersebut digunakan dalam menganalisis rekrutmen politik kekerabatan di Sulawesi Selatan, namun istilah dalam model-model tersebut tidak sepenuhnya sesuai untuk menggambarkan model rekrutmen politik kekerabatan yang terjadi di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, 4 model rekrutmen yang digunakan dalam disertasi ini adalah

⁹⁵ Meskipun model yang dibuat oleh Barbara Geddes ini mengacu kepada rekrutmen kabinet yang dilakukan oleh presiden, namun relevan untuk dijadikan acuan dalam menganalisis rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik.

model rekrutmen politik partisan, rekrutmen politik meritokratik, rekrutmen politik pragmatis dan model rekrutmen politik transaksional. Rekrutmen politik partisan adalah rekrutmen politik yang lebih mengutamakan loyalitas kepada partai politik, biasanya dilakukan dengan rekrutmen tertutup yang terbatas pada kader partai politik. Rekrutmen politik meritokratik adalah rekrutmen politik yang berdasarkan kepada prestasi dan bersifat impersonal. Dalam konteks rekrutmen caleg, rekrutmen politik meritokratik berdasarkan pada kompetensi atau kualitas kandidat, mempunyai pengalaman politik yang disyaratkan dalam rekrutmen dan bersifat impersonal. Rekrutmen politik pragmatis⁹⁶ adalah rekrutmen politik yang lebih didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan pragmatis jangka pendek. Rekrutmen politik transaksional⁹⁷ adalah rekrutmen politik yang didasarkan atas pertukaran atau balas jasa. Dari keempat model rekrutmen politik tersebut, disertai ini mengembangkan tipologi politik kekerabatan menjadi 3 yaitu politik kekerabatan oligarki-meritokratik, politik kekerabatan transaksional dan politik kekerabatan pragmatis.

⁹⁶ Menurut penulis, istilah pragmatis ini lebih cocok daripada kompartementalisasi, karena rekrutmen yang dilakukan lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pragmatis.

⁹⁷ Karena survival lebih menonjolkan kepada aspek hidup/matinya organisasi atau hidup matinya politik kekerabatan, maka istilah transaksional lebih sesuai daripada survival. Karena rekrutmen politik lebih didasarkan pada pertukaran atau transaksi politik antara kedua pihak. Transaksi sering diartikan sebagai bentuk pertukaran materi atau politik uang, namun dalam tipologi ini transaksi dimaknai secara lebih luas sebagai kesepakatan politik antara dua pihak.

Politik kekerabatan oligarki-meritokratik adalah politik kekerabatan yang dihasilkan melalui prosedur demokrasi, bersumber pada kader dan didasarkan pada kompetensi yang dimiliki oleh kandidat, namun tidak sepenuhnya didasarkan kepada *merit-system*; yaitu karena adanya kecenderungan oligarki dalam pengambilan keputusan yang melemahkan aspek impersonal dalam *merit-system*. **Politik kekerabatan transaksional**, yaitu politik kekerabatan yang terjadi didasarkan transaksi politik/balas jasa antara kedua pihak, sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang digariskan partai dan kurang memperhatikan aspek kualitas kandidat. **Politik kekerabatan pragmatis**, yaitu politik kekerabatan yang direkrut secara elitis yang berasal dari kader/non-kader yang lebih memperhatikan kepentingan jangka pendek untuk mendulang suara daripada kualitas kandidat.

Tabel 10.: Tipe Politik Kekerabatan pada Masing-Masing Partai

Asal Partai	Non Politik Kekerabatan	Tipe Politik Kekerabatan		
		Oligarki-meritokratik	Transaksional	Pragmatis
Partai Golkar	2	1	-	1

Partai Amanat Nasional	-	-	1	-
Partai Demokrat	-	-	-	1

Tabel 10 menunjukkan bahwa tidak semua anggota politik kekerabatan yang menduduki jabatan politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan.

10. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini mengacu kepada beberapa hipotesis dalam penelitian ini. *Pertama*; teori oligarki partai politik dari Robert Michels masih relevan untuk menjelaskan berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan. Namun demikian, thesis Robert Michels tentang kecenderungan oligarki dalam organisasi yang menyatakan bahwa perkembangan oligarki seiring dengan perkembangan organisasi tidak sesuai dalam konteks Sulawesi Selatan, karena oligarki yang terjadi di dalam partai politik di Sulawesi Selatan bukan karena perkembangan organisasi partai namun muncul sejak awal pembentukan organisasi yang dipengaruhi oleh faktor budaya lokal.

Kedua dalam perspektif institusionalisasi partai politik, thesis dari O'Dwyer yang menyatakan bahwa lemahnya institusionalisasi partai politik mendorong terjadinya patronase politik relevan untuk menganalisis politik kekerabatan di Sulawesi Selatan. Dalam kasus Sulawesi Selatan, bukan hanya lemahnya institusionalisasi yang mendorong politik kekerabatan, namun ada hubungan timbal balik antara institusionalisasi partai politik dengan politik kekerabatan, di satu sisi

lemahnya institusionalisasi mendorong terjadinya politik kekerabatan dan di sisi yang lain kuatnya politik kekerabatan memperlemah institusionalisasi partai politik.

Ketiga dalam teori sosialisasi dari Almond dan Verba maupun Prewitt dan Martinez, sosialisasi politik dalam keluarga mempengaruhi ketrampilan politik seseorang, sehingga kandidat yang berasal dari keluarga politik biasanya mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dalam rekrutmen politik terverifikasi, namun kualitas kandidat dipengaruhi oleh urutan memperoleh jabatan politik dalam satu keluarga. Semakin panjang urutan dalam memperoleh jabatan politik dalam satu keluarga, kualitas kandidat semakin menurun yang dipengaruhi oleh umur dan kesempatan politik.

Keempat, Prewitt dan Martinez menyatakan bahwa sosialisasi politik dalam keluarga mempengaruhi identifikasi partai politik tidak terverifikasi. Dalam kasus keluarga politik di Sulawesi Selatan, identifikasi partai politik dalam satu keluarga berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh lemahnya ikatan ideologis dan pragmatisme politik karena adanya kesempatan yang diberikan melalui partai-partai baru yang muncul pada era reformasi.

Kelima yang merupakan rangkuman dalam penelitian ini adalah bahwa berkembangnya politik kekerabatan di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu oligarki partai dalam rekrutmen politik, lemahnya institusionalisasi partai politik, legasi politik yang dimiliki oleh keluarga politik, dan kesempatan politik yang diberikan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sistem multi partai dan sistem pemilu proporsional dengan suara terbanyak.

Temuan ini melengkapinya thesis dari penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan adalah kekuatan *incumbent* (Ernesto Dal Bo dan Pablo Querobin), nama besar keluarga (Hess), dan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat (Daniel Markham Smith).

Keenam; pengertian politik kekerabatan tidak semata-mata terkait dengan variabel jumlah keluarga yang menduduki jabatan politik seperti dikemukakan oleh Hess, Dal Bo maupun Casey, namun disertasi ini menambahkan dua variabel penting dalam pengertian politik kekerabatan yaitu variabel proses rekrutmen dan kualitas kandidat.

Ketujuh, berdasarkan penerapan model rekrutmen dari Barbara Geddes dan kualitas kandidat dari Jacobson dan Kernell, terdapat 3 tipologi politik kekerabatan dari disertasi ini yaitu politik kekerabatan oligarki meritokratik, politik kekerabatan transaksional, dan politik kekerabatan pragmatis.

11. Implikasi Praktis:

Terdapat beberapa implikasi empiris dari hasil penelitian ini. *Pertama*; hasil penelitian dari disertasi ini menunjukkan bahwa tidak semua politisi yang berasal dari keluarga politik merupakan manifestasi dari politik kekerabatan. Oleh karena itu, persyaratan untuk menjadi calon gubernur/bupati/walikota yang menyebutkan bahwa calon gubernur/bupati/walikota tidak mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan gubernur/bupati/walikota untuk daerah yang sama kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan, adalah tidak adil dan tidak

demokratis karena hak memilih dan dipilih merupakan hak setiap warganegara.

Namun demikian, pelarangan terhadap politik kekerabatan perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dan menghindari nepotisme dalam rekrutmen politik, dengan memberikan batasan yang jelas mengenai politik kekerabatan, yaitu rekrutmen politik yang tidak didasarkan pada kemampuan kandidat dan tidak melalui prosedur yang telah ditentukan, yang menghasilkan anggota keluarga yang menduduki jabatan politik/pemerintahan karena pertimbangan hubungan kekerabatannya, baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan.

Kedua; pembatasan politik kekerabatan melalui undang-undang tidak akan efektif apabila tidak disertai pembenahan sistem rekrutmen politik dari partai politik. Perlu dilakukan penguatan partai politik dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik, terutama rekrutmen politik, kaderisasi dan pendidikan politik. Agar memperoleh calon-calon yang berkualitas, partai politik perlu terus melakukan kaderisasi sehingga tidak tergantung kepada figur-figur populer dari luar partai. Partai juga perlu konsisten dengan aturan main yang sudah ditetapkan partai sehingga mekanisme partai berjalan baik dan tidak terjebak kepada kekuatan figur tertentu. Selain itu, pendidikan politik perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih kritis dalam memilih caleg ataupun para pemimpin politik.

Ketiga; politik kekerabatan tidak hanya terjadi pada jabatan eksekutif namun juga pada jabatan legislatif, sehingga pencegahan politik kekerabatan juga perlu

dilakukan dalam Undang-Undang tentang rekrutmen anggota DPR, DPD dan DPRD dengan batasan makna politik kekerabatan yang jelas. Selain itu, untuk menjaga kualitas anggota legislatif, perlu pembatasan usia secara berjenjang, baik untuk anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi maupun DPR RI sehingga terdapat kaderisasi dan jenjang karir yang jelas dalam jabatan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustyanto, Ruddy , *Jaringan Sosial dalam Organisasi*, Rajawali Press, Jakarta, 1997.
- Almond, Gabriel A., dan E Bingham Powell, *Comparative Politics: A Development Approach*, Feffer & Simons, Bombay, 1966.
- Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba, *The Civic Culture, Political Attitudes and Democracy in Five Nations*, Sage Publications, 1989.
- Amal, Ichlasul, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 21012.
- Alwasilah, A. Chaedar, *Pokoknya Kualitatif, Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2009.
- Aspinal, Edward dan Marcus Mietzer (Editor), *Problems of Democratisation in Indonesia*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 2010.
- Ambardi, Kuskridho, *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Kepustakaan Populer Grafindo, Jakarta, 2009.
- Anonim, *Pembiayaan Partai Politik Sulawesi Selatan 2013*, Kemitraan Partnership dan Kopel, 2013.
- Bottomore, T.B., *Elites and Society*, New York: Penguin Books, 1982.

- Chilcote, Ronald H, *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Cipto, Bambang, *Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Creswell, J. dan Plano Clark, *Designing and Conducting Mix Methods Research*, Sage Publications, 2011.
- Dal Bo, Ernesto; Pedro Dal Bo dan Jason Snyder, *Political Dynasties*, Stanford University, 2007.
- Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009
- Diamond, Larry dan Richard Gunther, *Political Parties and Democracy*, The John Hopkins University Press, Baltimore and London, 2001.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Geddes, Barbara, *Politicians Dilema: Building State Capacity in Latin America*, University of California Press, 1996.
- Giddens, Anthony, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern*, UI Press, Jakarta, 1986.

- Guzman, Raul de dan Mila A Reforma, *Decentralization Towards Democratization and Development*, EROPA Secretariat, Manila, 1993.
- Harris, John; Kristian Stokke and Olle Turnquist, *Politicising Democracy, The Local Politics of Democratisation*, MacMillan Publisher, USA, 2011.
- Haris, Syamsudin (editor), *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demorasi di Indonesia*, LIPI, Jakarta, 2007.
- Haris, Syamsudin (Editor), *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai, Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Gramedia, Jakarta, 2005.
- Hazan, Reuven Y. dan Gideon Rahat, *Democracy Within Parties, Candidate Selection Methods and their Political Consequences*, Oxford University Press, New York, 2010.
- Held, David, *Models of Democracy*, Akbar Tanjung Institute, Jakarta, 2006.
- Janda, Kenneth, *Toward A Performance Theory of Change in Political Parties*, Department of Political Science, Northwestern University, 1990.
- Kahin, Audrey R., *Pergolakan Daerah pada Awal Kemerdekaan*, Grafiti Pers, Jakarta, 1990.

- Keller, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elite, Peranan Elite Penentu dalam Masyarakat Modern*, terjemahan, Rajawali Pers, Jakarta, 1995
- Leach, Steve, *The Changing Role of Local Politics in Britain*, The Policy Press University of Bristol, UK, 2006.
- Liddle, William, *Partisipasi dan Partai Politik di Indonesia Awal Orde Baru*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1992.
- Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2011.
- Mattulada, *Latoa, Suatu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Mas'ood, Mohtar, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Mitchels, Robert , *Partai Politik, Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Norris, Pippa, *Passages To Power, Legislative Recruitment in Advanced Democracies*; Chambrige University Press, 1997.
- Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken (editor), *Politik Lokal di Indonesia*, Obor, Jakarta, 2007.

- O'Dwyer, Conor, *Runaway State Building, Patronage Politics and Democratic Development*, The John Hopkin University Press, Baltimore, 2006.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Forum Jakarta-Paris, 2006.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, *Minawang: Patron dan Klien di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Struktural-Fungsional*, Gadjah Mada University Press, 1988.
- Rahim, A. Rahman, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Penerbit Ombak, Jakarta, 2011.
- Romli, Lili, *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Provinsi Banten 2001-2006*, Disertasi Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008.
- Siavelis, Peter M., dan Scott Morgenstern, *Pathways To Power, Political Recruitment and Candidate Selection in Latin America*, The Pennsylvania State University Press, 2008.
- Scarrow, Susan, *Political Parties and Democracy in the Theoretical and Practical Perspectives, Implementing Intra-Party Democracy*, National Democratic Institute for International Affairs, 2005.
- Sugiono, Muhadi, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Supranto, J., *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Tanjung, Akbar, *The Golkar Way, Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Gramedia, Jakarta, 2007.

Winters, Jeffrey A., *Oligarchy*, Cambridge University Press, London, 2011.

Zuhro, R. Siti, yang berjudul *Demokrasi Lokal, Peran Aktor dalam Demokratisasi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2009.

Zuhro, Siti R., dkk; *Demokrasi Lokal, Perubahan dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2009

Skripsi, Thesis dan Disertasi:

Casey, Kimberly Lynn, *Family Matters: The Prevalence and Effects of Political Families in National Politics*, Disertasi, University of Missouri, 2009.

Gonggong, Anhar, *Abdul Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1950-1965*, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990.

Paiker, Herios, *Jaringan Keluarga Yasin Limpo dalam Penguatan Kekuasaan Syahrul Yasin Limpo*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2012.

- Querubin, Pablo, *Political Reform and Elite Persistence: Term Limits and Political Dynasties in the Philippines*, Harvard Academy for International and Area Studies, Oktober, 2011.
- Romli, Lili, *Jawara dan Penguasaan Politik Lokal di Propinsi Banten 2001-2006*, Disertasi, Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008.
- Savirani, Amalinda, *Local Strongmen in New Regional Politics in Indonesia*, Thesis, pada program Master di International School of Humanities and Social Science Universiteit van Amsterdam, pada tahun 2004
- Smith, Daniel Markham, *Succeeding in Politics: Dynasties in Democracies*, Disertasi, University of California, 2012.
- Staubert, Alexander A. *Strength of Party Identification: A Cross-National Comparison of Individual and Contextual Determinant*, Thesis pada department of Political Science, University of Oslo, 2012.
- Sugiprawaty, *Etnisitas, Primordialisme dan Jejaring Politik di Sulawesi Selatan (Studi Pilkada di Sulawesi Selatan Tahun 2007-2008)*, Thesis, Universitas Diponegoro, Tahun 2009.
- Ubbe, Ahmad, *Perbuatan Malewang (Kesusilaan Siri) menurut Hukum Adat: Studi tentang Pandangan*
Universitas Indonesia

Pengadilan dan Masyarakat Bugis Sulawesi Selatan, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Zulham, Muhammad, *Pengaruh Klan Yasin Limpo dalam Panggung Politik di Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2011.

Zulqifli, *Pemilihan Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan Pada Musyawarah Daerah DPD I Partai Golkar 2009*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2013.

Jurnal:

Achen, Christopher H., “Parental Socialization and Rational Party Identification”, *Political Behavior Journal*, Vol. 24, No. 2, Juni 2002.

Agustino, Leo dan Mohammad Agus Yosoff, “Politik Lokal di Indonesia: dari Otokratik ke Reformasi Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, AIPI, Tahun 2010.

Buehler, Michael dan Paige Tan, “Party-Candidate Relationship in Indonesian Local Politics: A Case Study of the 2005 Regional Election in Gowa South Sulawesi Province”, dalam *Indonesia* 8, Oktober 2007.

Djati, Wasisto Raharjo, “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di

Aras Lokal”, dalam *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 2, Juli 21013.

Domhoff, G William, “Mills’s The Power Elite 50 Year Later”, *Contemporary Sociology*, November 2006.

Eriyanto, “Dinasti Politik dalam Pilkada: Menguntungkan atau Merugikan Kandidat? (Kasus Pilkada Kabupaten Kediri)”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, MIPI, Jakarta, 2012.

Gordon Hands, Robert Michels and The Study of Political Parties”, dalam *British Journal of Political Science*, Vol. 1, No. 2, April 1971, cambridge University Press, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/193505>

Jaspers, Eva; Marul Lubbers dan Jannes de Vries; “Parents, Children dan the Distance Between Them: Long Term Socialization effects in Netherlands”, dalam *Journal of Comparative Family Studies*, Vol.39, No. 1, Winter 2008.

Jacoby, William G., “Ideology and Vote Choice in the 2004 Election”, dalam *Electoral Studies*, No. 28, Mei tahun 2009.

Jones, Doug, “Group Nepotism and Human Kinship”, *Current Anthropology*, Vol. 41, No. 5, Desember 2000.

- Kurtz II, Donn M., “The Political Family: A Contemporary View”, dalam *Sociological Perspectives*, Vol. 32, No. 3, University of Southwestern Louisiana, 1989.
- Donn M, Kurtz II, “Introduction: The Family in Politics”, in *The American Family*, University Press of America, 1993.
- Levitsky, Steven, “Institutionalization and Peronism, The Concept, The Case, and The Case for Unpacking the Concept”, dalam *Party Politics*, Vol. 4, No. 1, Sage Publication, tahun 1998.
- Liefferinge, Hilde van dan Kristof Steyvers, “Family Matters? Degrees of family politicization in Political recruitment and Career Start of Mayors in Belgium”, dalam *Acta Politica* Vol. 44, No. 2, Palgrave Macmillan, 2009.
- Lipp, Carola, *Kinship Network, Local Government and Election in a Town in Southwest Germany 1800 – 1850*, *Journal of Family History*, 30, Sage Publications, 2005.
- Mattulada, *South Sulawesi, Its Ethnicity and Way of Life*, dalam *Southeast Asian Studies*, Vol. 20, 1 Juni 1982.
- Martinez, Liza L, “*Politizing the Family: How grass roots organizations mobilized Latinos for Political Activism in Colorado*”, University of

- Denver Colorado, dalam *Latino Studies*, Vol. 8 No. 4, Macmillan Publisher, 2010.
- Mujahidin, Imam, dkk, *Pasang Surut Polarisasi Elite di dalam Etnis Bugis dan Makassar*, dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, September 2012.
- Niemi, Richard G. dan M. Kent Jennings, “Issues and Inheritance in the Formation of Party Identification”, dalam *American Journal of Political Science*, Vo. 25, Issue 4, University of Wisconsin Press, November 1991
- Norris, Pippa, dan Joni Lavenduski, “If Only More candidates Came Forward: Supply-side Explanation of Candidate Selection in Britain”, dalam *British Journal of Political Science*, Cambridge University Press, Vol. 23, No. 3, Juli, 1993.
- Rabinowitz, George and MacDonald, Stuart Elaine, “A Directional Theory of Issue Voting”, dalam *American Political Science Review*, 1989, Vol. 1.
- Scott, James C., “Patron-Client Politics and Political Change in Southeast Asia”, *The American Political Science Review*, Vol. 66, Maret 1972.
- Sutton, R. Anderson, *Reforming Arts and Cultural Politics in South Sulawesi*, KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, BKI 151-IV (1995), diakses dari

<http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>, 28 Desember 2011

Woolcock, Michael; dan Deepa Narayan, *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*, dalam *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, no. 2, Agustus 2000.

Yamokoshi, Alexis dan Joshua Kjerulf Dulbrow, "How Do Elite Define Influence ? Personality and Respect as Source of Social Power", dalam *Sociological Fokus*: November 2008

Hasil Rakernas Partai Golkar 2010 "Suara Golkar Suara Rakyat", Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Makalah:

Abdullah, Hamid, *Feodalisme dan Revolusi 1945 di Sulawesi Selatan*, makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Semarang, 17 Juni 1989.

Asako, Yasushi; Takeshi Iida, Tetsuya Masubayashi, Miciko Uida, *Dynastic Politicians: Theory and Evidence from Japan*, Waseda University Organization for Japan-US Studies, Working Paper No.201201, 11 April 2012.

Asba, A. Rasyid, *Demokrasi yang Merana: Terbaikannya Nilai-Nilai Lokal dalam*

Pengembangan Demokrasi di Indonesia, Makalah Kuliah Umum STISIP Muhammadiyah Sinjai, 29 September 2011.

Buehler, Michael *Elite Competition and Changing State-Society Relations: Shari'a Policy Making in Indonesia*, Northwestern University, diakses dari <http://eprints.soas.ac.uk/18932/>.

Eriyanto, Faktor Etnis dalam Pilkada, *Lingkar Survey Indonesia*, Edisi 09 Tahun 2008.

Hadiz, Vedi R *Decentralization and Democracy in Indonesia : A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives*, Working Paper, Center of Southeast Asian Studies, University of Hongkong and the Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore.

Maisel, L. Sandy; Walter J. Stone, dan Cherie Maestas, *Reassessing the Definition of Quality Candidates*, makalah disampaikan pada Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, 15-17 April 1999.

Martin Kroh, *The Formative Period of Party Identification: Parental Education in Childhood and Adolescence*, makalah pada Annual Meeting of the American Political Science, Washington DC, September, 2010

Paskeviciute, Aida dan Christopher J. Anderson, *Political Party Behaviour and Political Trust in*

Contemporary Democracies, American Political Science Association, Philadelphia, 2003.

Stone, Walter J., et.all., *Candidate Quality and Voter Response in U.S. House Elections*, makalah disampaikan dalam American Political Science Association Annual Meeting, Philadelphia, 3 September 2006.

Koran dan Majalah:

Majalah *Prisma*, Otonomi Daerah untuk Siapa?, Vol. 29, Juli 2010.

Majalah *Tempo*, 29 Agustus 2009.

Tempo Interaktif, 3 Nopember 2009

Antara News, 11 Februari 2010

antaranews.com-edisi Senin, 16 November 2009

Jawa Post National Network, 14 Januari 2010.

Harian Rakyat merdeka, 16 Septermber 2010.

Kompas, 27 Februrari 2011

Kompas, 1 Juni 2012.

Kompas.com, 6 Juni 2012.

Kompas, 19 Agustus 2012.

Kompas, 16 November 2012.

Kompas, 17 September 2012.

Kompas, 22 Februari 2013.

Kompas, 1 April 2013.

Sinar Harapan, 13 Mei 2009.

Harian Tribun, Makassar, 10 Mei 2007

<http://mpr.a.u.b.uni-muenchen.de/40104/>, 15 Juli 2012.

Beritakotamakassar.com, diakses 8 Januari 2014

<http://www.antara-sulawesiselatan.com/berita/41244/azis-kahar-mudzakkar-singgung-dinasti-keluarga>, diakses tanggal 18 April 2014.

<http://www.ujungpandangekspres.com/index.php?option=read&newsid=79772>, di akses Tanggal 28 Jan 2012.

<http://www.fajar.co.id/read-20120619232405-sayang-didukung-banyak-ceo>

Sindonews.com, Apdesi Bone Instruksikan Menangkan Syahrul, 12 Desember 2012.

<http://beritakotamakassar.com/index.php/politik/21371-ampi-janji-tenri-olle-tetap-ranking-satu.html>, diakses tanggal 18 April 2014.

<http://www.tempo.co/read/news/2010/09/21/176279425/Pengusung-Madusila-Gugat-Proses-Penetapan-Calon>, diakses tanggal 18 April 2014

<http://makassar.tribunnews.com/2013/04/20/ini-yang-membuat-dinasti-yasin-limpo-sulit-kalah-di-gowa>, diakses tanggal 18 April 2014.

Cakrawalaberita.com, 6 Agustus 2012

Cakrawala.com tanggal 10 Maret 2012, diakses tanggal 30 Januari 2013

Tempo Interaktif, 28 November 2002, diakses tanggal 21 April 2014

antaranews.com, Senin, 16 November 2009 diakses tanggal 3 Januari 2014.

<http://beritakotamakassar.com/index.php/topik-utama-hari-ini/17460-kolonel-yang-rendah-hati-sama-pembantu-pun-bilang-qtabeq.html>, diakses tanggal 23 April 2014.

Tribun-Timur.com pada tanggal 25 Januari 2014; diakses tanggal 21 April 2014.

<http://beritakotamakassar.com/index.php/topik-pilihan/1027-kamis-polda-periksa-irsan.html>, 23 Oktober 2013, diakses tanggal 19 April 2014.

Tribun Timur, 2 April 2008